



Aksi! for gender, social and ecological justice

TANTANGAN DALAM MEMANTAU PROYEK GCF DI INDONESIA

April 2024

Titi Soentoro/Yudith Sari Dewi

Tantangan dalam Memonitoring Proyek GCF di Indonesia

Penulis

Titi Soentoro

Yudith Sari Dewi

Diterbitkan pertama kali oleh Aksi! for gender, social, and ecological justice.
Cetakan pertama, 2025

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak tulisan dalam buku ini sebagian atau seluruhnya
dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

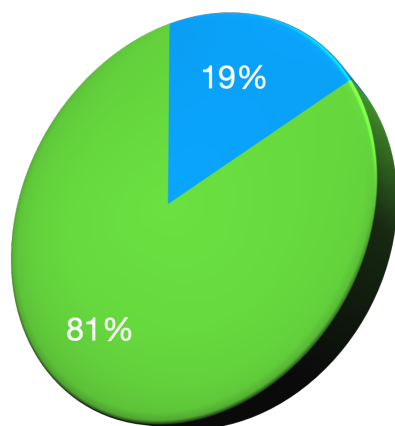
Aksi! untuk keadilan gender, sosial, dan ekologi terlibat secara kritis dalam perdebatan dan wacana kebijakan pembangunan dan perubahan iklim untuk mempromosikan hak asasi perempuan dan hak-hak komunitas lain yang terkena dampak dan terpinggirkan; sambil mendukung aksi perempuan akar rumput untuk keadilan gender, sosial, dan ekologi.

Ringkasan Eksekutif

FP083 MITIGATION INDONESIA Indonesia Geothermal Resource Risk Mitigation Project	FP130 MITIGATION INDONESIA Indonesia REDD-plus RBP for results period 2014-2016	FP196 MITIGATION INDONESIA Supporting Innovative Mechanisms for Industrial Energy Efficiency Financing in Indonesia with Lessons
FP221 CROSS-CUTTING MULTIPLE COUNTRIES E-Mobility Program	FP20 CROSS-CUTTING MULTIPLE COUNTRIES Sustainable Renewables Risk Mitigation Initiative (SRMI) Facility (Phase 2 Resilience focus) SRMI-	FP156 MITIGATION MULTIPLE COUNTRIES ASEAN Catalytic Green Finance Facility (ACGF): Green Recovery Program
FP215 ADAPTATION MULTIPLE COUNTRIES Community Resilience Partnership Program	FP197 CROSS-CUTTING MULTIPLE COUNTRIES Green Guarantee Company ("GGC")	FP194 CROSS-CUTTING MULTIPLE COUNTRIES Programme for Energy Efficiency in Buildings (PEEB) Cool
FP212 CROSS-CUTTING MULTIPLE COUNTRIES Green Fund: Investing in Inclusive Agriculture and Protecting Forests	FP180 ADAPTATION MULTIPLE COUNTRIES Global Fund for Coral Reefs Investment Window	FP099 MITIGATION MULTIPLE COUNTRIES Climate Investor One
FP222 CROSS-CUTTING MULTIPLE COUNTRIES Project GAIA ("GAIA")	FP190 CROSS-CUTTING MULTIPLE COUNTRIES Climate Investor Two	FP152 MITIGATION MULTIPLE COUNTRIES Global Subnational Climate Fund (SnCF Global) – Equity
FP151 MITIGATION MULTIPLE COUNTRIES Global Subnational Climate Fund (SnCF Global) – Technical Assistance (TA) Facility		

Gambaran Umum 16 Proyek GCF Terdaftar untuk Indonesia

Dana Iklim Hijau mencatat 16 proyek di Indonesia sejak Oktober 2018 hingga Maret 2024, dengan total nilai proyek sebesar USD 14 miliar yang terdiri dari pembiayaan GCF sekitar USD 2,2 miliar dan pembiayaan tambahan sebesar USD 11,8 miliar. Selanjutnya, pembiayaan GCF terdiri dari 45% pinjaman, 35% hibah, 14% ekuitas, dan 5% jaminan.



19% proyek untuk Indonesia dan
81% untuk multi-negara

Hanya tiga proyek, atau 19% dari proyek secara langsung untuk Indonesia. 81% lainnya adalah proyek untuk multi-negara. Ini berarti bahwa pembiayaan proyek tidak hanya untuk Indonesia; Indonesia termasuk di antara beberapa negara tercantum sebagai penerima. Jenis pembiayaan multi negara seperti ini di antara 16 proyek tersebut ada yang sampai untuk 9 hingga 42 negara. Berapa banyak yang akan diterima Indonesia dari kue besar itu masih belum pasti. Seorang staf kementerian Indonesia bertanya kepada perwakilan pengusul proyek dalam diskusi untuk pembahasan Surat Tidak Keberatan (*No-Objection Letter*) tentang masalah ini. Jawabannya lugas: *"Kami belum tahu dan tidak dapat menjanjikan angka apa pun"*.

13 dari 16 proyek tersebut, atau 81%, merupakan proyek berskala besar dengan pembiayaan di atas USD 250 juta; 2 proyek, atau 13%, merupakan proyek berskala menengah dengan pembiayaan antara USD 50 juta dan 250 juta, dan hanya satu proyek, atau 6%, merupakan proyek berskala kecil dengan pembiayaan antara USD 10 juta dan USD 50 juta. 44% dari 16 proyek tersebut merupakan proyek mitigasi, 44% proyek lintas sektor, sementara hanya dua proyek, atau 12%, merupakan proyek adaptasi.

Mengenai area hasil, empat dari 16 proyek GCF yang terdaftar di Indonesia, atau 25%, difokuskan pada satu area hasil, sedangkan yang lain memiliki lebih dari satu area fokus; bahkan FP 190, misalnya, mencakup enam area hasil.

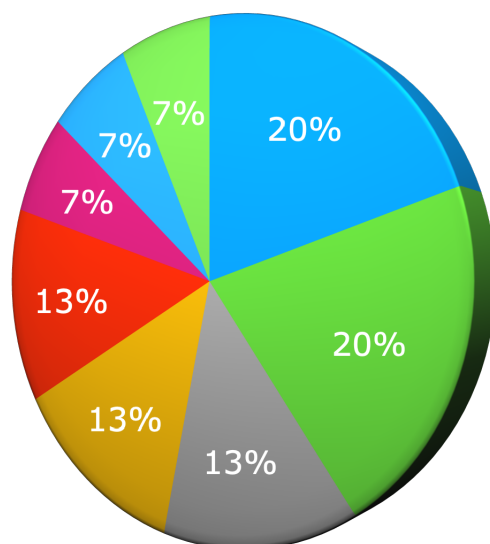
Bidang hasil dari 16 proyek tersebut meliputi sebagai berikut:

- Pembangkitan energi & Akses dalam 9 proyek (56% dari 16 proyek)
- Infrastruktur & lingkungan binaan dalam 8 proyek (50% dari 16 proyek)
- Bangunan, kota, industri & peralatan dalam 7 proyek (44% dari 16 proyek)
- Hutan & pemanfaatan lahan dalam 6 proyek (38% dari 16 proyek)
- Kesehatan dan kesejahteraan, ketahanan pangan & air dalam 5 proyek (31% dari 16 proyek)
- Ekosistem & layanan ekosistem dalam 5 proyek (31% dari 16 proyek)
- Transportasi dalam 5 proyek (31% dari 16 proyek)
- Mata pencaharian masyarakat & komunitas dalam 3 proyek (19% dari 16 proyek)

Perlu dicatat bahwa jumlah proyek yang ditujukan meningkatkan penghidupan masyarakat dan komunitas, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan proyek yang berfokus pada infrastruktur.

56% dari proyek yang terdaftar merupakan pembiayaan sektor swasta, dan 44% merupakan pembiayaan sektor publik, yang menggunakan kombinasi hibah, utang lunak, jaminan, atau instrumen ekuitas untuk memanfaatkan pembiayaan campuran dan mengumpulkan investasi swasta untuk aksi iklim di Indonesia dan negara lain. 13 dari 16 proyek merupakan hibah, delapan proyek merupakan pinjaman, tiga proyek merupakan ekuitas, dan dua proyek merupakan jaminan dan hibah yang dapat diganti.

Lembaga keuangan internasional, dengan 87,5%, mendominasi peran sebagai perantara antara GCF dan pelaksana proyek di lapangan. Bank Pembangunan Asia dan Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) adalah perantara utama (masing-masing 3 proyek), diikuti oleh Bank Dunia dan sebuah grup jasa keuangan global terkemuka yang salah satu lembaga perbankan terbesar di Jepang, yaitu Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) dan Pegasus Capital Advisors (PGA) (masing-masing 2 proyek) dan Bank Pembangunan Korea (satu proyek). Hanya dua perantara yang merupakan lembaga non-keuangan, yaitu United Nations Development (UNDP) dan International Union for Conservation of Nature yang masing-masing satu proyek (12,5%). Perlu dicatat, belum ada Entitas Terakreditasi Indonesia yang mengusulkan proyek apa pun di Indonesia, meskipun ada dua Entitas Akses Langsung Indonesia, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang disetujui pada Desember 2016, dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan untuk Reformasi Tata Kelola) yang disetujui pada November 2020.



Pemilik proyek hanyalah lembaga keuangan internasional

● ADB ● FMO ● Bank Dunia
 ● MUFG ● PGA ● KDB
 ● UNDP ● IUCN

Hanya 31% dari proyek yang terdaftar untuk Indonesia tersebut yang dilaksanakan oleh Entitas Pelaksana Indonesia seperti PT. SMI, Kementerian Keuangan, dan cabang sebuah bank Indonesia. Sisanya, 69% dari inisiatif ini dilaksanakan oleh entitas non-Indonesia. Banyak entitas pelaksana adalah perantara keuangan yang akan dibentuk oleh Entitas Terakreditasi melalui proyek-proyek tersebut. Jadi, perantara tersebut menciptakan perantara keuangan lain untuk melaksanakan proyek yang mereka usulkan.

75% dari proyek adalah intermediasi, dan 25% adalah proyek langsung. Mengenai kategori risiko proyek, 50% adalah proyek berisiko tinggi (enam intermediasi-1 dan dua kategori A), yang berarti proyek-proyek tersebut berpotensi memicu risiko dan/atau dampak lingkungan dan/atau sosial yang merugikan secara signifikan dan beragam, tidak dapat dipulihkan, atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Sebelas proyek berisiko sedang (6 Intermediasi-2 dan 5 Kategori B). Risiko dan dampak didefinisikan sebagai potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan ringan, umumnya spesifik lokasi, sebagian besar dapat dipulihkan, dan mudah ditangani melalui langkah-langkah mitigasi. 2 dari 16 proyek berada dalam kategori C, dianggap sebagai risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang minimal. Lebih lanjut, tiga proyek terdaftar memiliki gabungan Intermediasi-1 dan Kategori B (FP151, FP152, dan FP122).

Fitur utama dari 3 proyek langsung (untuk Indonesia) FP083, FP130 dan FP196 adalah:

- Fasilitas pembiayaan untuk Geothermal Resource Risk Mitigation (Mitigasi Risiko Sumber Daya Geothermal) yang memberikan utang untuk eksplorasi di 20 lokasi.
- Bantuan Teknis dan Pengembangan Kapasitas untuk meningkatkan Entitas Pelaksana dalam mengelola Fasilitas Geothermal.
- Pembayaran berbasis hasil REDD+ (RBP) untuk memperkuat arsitektur iREDD+ dan memperluas serta meningkatkan operasionalisasi Kehutanan Sosial dan Unit Pengelolaan Hutan (FMU)

Seperti telah disebutkan sebelumnya, 13 dari 16 proyek yang terdaftar di Indonesia merupakan proyek multi-negara. Hanya lima dari 13 proyek multi-negara yang mengembangkan rencana program untuk Indonesia dalam proposal proyek mereka; Sementara itu, 7 proyek lainnya tidak mencantumkan rencana apa pun untuk Indonesia dalam proposalnya.

Rencana program untuk Indonesia pada proyek multi-negara adalah:

- Fasilitas pendanaan untuk proyek mitigasi perubahan iklim daerah dan kota berskala kecil, termasuk mikrohidro, limbah menjadi energi, dan kendaraan listrik.
- Fasilitas pembiayaan efisiensi energi industri pada industri padat energi dan wilayah seperti Jakarta, Jawa Timur/Barat/Tengah, Banten, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan/Utara).
- Fasilitas pembiayaan untuk mengembangkan pasar keuangan cerdas iklim di Indonesia dan untuk mendukung penataan instrumen utang swasta untuk membiayai proyek-proyek
- Peningkatan jaringan listrik untuk meningkatkan integrasi Variable Renewable Energy (VRE) serta keandalan dan ketahanan jaringan listrik; penggelaran 400 MWp dengan sistem penyimpanan energi baterai (BESS) Independent Power Producer (IPP); program elektrifikasi bagi masyarakat, dan mendukung Kerangka Kerja Elektrifikasi Berbiaya Rendah Berkelanjutan Indonesia (ISLE).
- Meningkatkan sistem transportasi umum dan meningkatkan integrasi sistem moda BRT
- Fasilitas Bantuan Teknis untuk meningkatkan lingkungan yang mendukung praktik pertanian rendah emisi (perkebunan kelapa sawit), memberikan insentif kepada produsen agar berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan mendukung pengembangan dan penegakan kebijakan pemerintah serta kerangka peraturan yang efektif.

Intervensi jaringan pengamat CSO pada Rapat Dewan GCF selama pembahasan 16 proyek tersebut adalah tidak mendukung berdasarkan kajian mereka dan umpan balik dari CSO Indonesia yang tidak mendukung proyek-proyek tersebut. Contohnya, dukungan terhadap surat penolakan yang ditandatangani 52 CSO dan individu Indonesia yang dikirim ke NDA Indonesia terhadap FP204 Sustainable Renewables Risk Mitigation Initiative (SRMI) Facility Phase 2 Resilience Focus (SRMI-Resilience).

Alasan jaringan CSO tidak menyetujui 16 proposal proyek ini, antara lain, karena masalah transparansi dan akuntabilitas, seperti kurangnya informasi, pelanggaran standar pengungkapan informasi GCF, ketidakpastian kepatuhan terhadap standar perlindungan GCF untuk subproyek berisiko tinggi, kajian lingkungan yang tidak memadai, dan hampir tidak adanya konsultasi dengan masyarakat adat dan komunitas terdampak.

Mengenai Rencana Aksi Gender (RAG) proposal proyek, intervensi jaringan pengamat CSO terutama membahas potensi dampak negatif pada perempuan akibat kurangnya pemahaman mendalam tentang situasi perempuan di masing-masing negara, khususnya yang berkaitan dengan proyek multi-negara yang melibatkan konteks yang

berbeda; ketidakpastian manfaat proyek bagi perempuan; kurangnya dampak gender dan penilaian risiko, termasuk dari bahaya untuk proyek berisiko tinggi, dan ketidakpastian mengenai kepatuhan subproyek terhadap Kebijakan Gender GCF, termasuk konsultasi dengan perempuan di negara-negara yang terlibat. 94% proyek yang terdaftar untuk Indonesia tidak memberikan informasi spesifik tentang apakah 16 RAG tersebut diterapkan di Indonesia.

Tantangan dalam Memantau 16 Proyek GCF

Berdasarkan informasi yang tersedia di situs web GCF serta situs web Entitas Terakreditasi dan Entitas Pelaksana, hanya 4 (25%) proyek yang memiliki informasi bahwa proyek tersebut dilaksanakan di Indonesia, sementara 12 proyek (75%) tidak memiliki informasi apa pun tentang pelaksanaan di Indonesia. Tantangan untuk memantau 16 proyek yang terdaftar untuk Indonesia tersebut terutama disebabkan oleh kurangnya informasi tentang status pelaksanaan proyek. Situs web GCF dan NDA Indonesia menyediakan informasi dasar tentang proyek dan dokumen yang diperlukan untuk persetujuan proyek tetapi tidak menyediakan informasi tentang proyek yang sedang dilaksanakan. Selain itu, di situs web Entitas Terakreditasi sebagai pemilik proyek dan Entitas Pelaksana, terdapat kurangnya informasi tentang pelaksanaan proyek di Indonesia sebagai negara penerima, bahkan tentang program atau lokasi proyek yang direncanakan. Selain itu, tidak ada informasi tentang penerapan semua kerangka kerja yang dibangun untuk perlindungan dan pemantauan proyek terhadap subproyek, juga tidak ada deskripsi terperinci tentang Rencana Aksi Gender (RAG).

Satu atau dua Entitas Terakreditasi telah merilis 'Laporan Status dan Hasil Pelaksanaan yang dapat diungkapkan' (disclosable Implementation Status and Results Reports/ISR), tetapi laporan ini sering kali sebagian bersifat rahasia dan tertunda secara signifikan, yaitu 6-9 bulan sebelumnya. Penundaan dan kurangnya transparansi ini berdampak besar pada efektivitas pemantauan proyek. Dokumen proyek yang disediakan di situs web NDA Indonesia, terutama dalam bahasa Inggris, menimbulkan hambatan signifikan untuk dipahami oleh para pemangku kepentingan, meskipun memiliki judul dalam Bahasa Indonesia.

Beberapa Entitas Terakreditasi, sebagai pemilik proyek, dan subproyek perantara keuangannya memiliki situs masing-masing. Mereka membuat pengumuman masing-masing di sana, tetapi pengumuman ini tidak selalu terhubung ke situs web Entitas Terakreditasi atau situs web GCF dan NDA Indonesia. Kurangnya koneksi ini semakin memecah informasi proyek yang tersedia, sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang proyek dan kemajuannya.

Kesimpulan

Saat memantau 16 proyek GCF yang tercatat untuk Indonesia, kami dihadapkan pada masalah krusial: kurangnya informasi yang tepat waktu dan komprehensif tentang status pelaksanaan proyek. Hal ini khususnya terlihat dalam kasus proyek geothermal yang direncanakan Bank Dunia di Indonesia, yang lokasinya masih belum dapat dilacak bahkan enam tahun setelah proyek disetujui pada tahun 2018. Kekhawatiran berkisar pada kepatuhan subproyek terhadap standar perlindungan GCF, Kebijakan Masyarakat Adat, dan Kebijakan Gender. Kebutuhan akan informasi lebih lanjut juga menghambat kemampuan kami untuk melacak aliran dana GCF. Hal ini menuntut penanganan segera.

Tidak ada informasi yang meyakinkan kami bahwa 16 proyek yang terdaftar di GCF tersebut memberi manfaat bagi 15,3 juta orang Indonesia, sebagaimana yang diklaim NDA Indonesia di situs webnya. Lebih lanjut, informasi dari GCF, NDA, dan situs relevan lainnya menunjukkan bahwa hanya lembaga keuangan internasional publik dan swasta yang menikmati dukungan dari NDA melalui Surat Tidak Berkeberatan (NOL). Mengenai tingginya jumlah NOL yang diterbitkan untuk entitas internasional terakreditasi yang berkuasa seperti ADB, Bank Pembangunan Korea, Bank Dunia, dan MUFG, antara lain, tampaknya NDA berada di bawah tekanan untuk menerbitkan NOL bagi mereka tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang terdampak iklim di Indonesia secara memadai. NOL dari NDA Indonesia menjadi batu loncatan bagi pemodal internasional, terutama tanpa kejelasan tentang berapa banyak uang yang dialokasikan untuk proyek-proyek di Indonesia. Program kesiapan untuk NDA dari GCF, yang didukung oleh GGGI dalam pelaksanaannya, mengakibatkan NDA tersebut hanya siap untuk mendukung entitas keuangan internasional publik dan swasta, bukan masyarakat yang terdampak iklim di Indonesia.

Masyarakat di negara berkembang, dalam konteks ini, masyarakat Indonesia, menghadapi krisis dan bencana iklim dan, karenanya, harus menjadi penerima manfaat utama dari dana GCF. Namun, 16 proyek GCF yang tercatat untuk Indonesia mengungkap kenyataan pahit. Kurangnya prioritas NDA untuk NOL bagi proyek adaptasi yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat yang terdampak iklim merupakan ketidakadilan yang jelas. Dengan memprioritaskan proyek adaptasi, kita dapat secara signifikan memperbaiki situasi bagi mereka yang telah terdampak dan terlantar akibat perubahan iklim, yang menawarkan harapan untuk masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Praktik NDA dalam menerbitkan NOL untuk mendukung investor dengan pinjaman proyek ke Indonesia dan negara berkembang lainnya memiliki implikasi keuangan yang signifikan. Pendekatan ini berpotensi menyebabkan peningkatan beban utang pemerintah Indonesia secara substansial, terutama jika proyek tersebut mengalami masalah. Implikasi keuangan jangka panjang dari pendekatan ini menjadi perhatian dan tidak dapat diabaikan.

—000—

Singkatan

AE	Accredited Entity
APR	Annual Performance Report
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
BM	Board Meeting
CSO	Civil Society Organisation
DSCR	Debt Service Coverage Ratio
EE	Executing Entity
EIA	Environment Impact Assessment
EMP	Environmental Management Plan
ESMF	Environment and Social Management Framework
ESMS	Environment and Social Management System
ESS	Environment and social safeguards
FP	Funding Proposal
FIRR	Financial Internal Rate of Return
FPIC	Free, Prior, and Informed Consent
GAP	Gender Action Plan
GCF	Green Climate Fund
GDP	Gross domestic product
GESIAP	Gender and Social Inclusion Action Plan
GHG	greenhouse gases
IE	Implementing Entity
IEE	Initial Environmental Examination
ISR	Implementation Status and Results Report
MDB	Multilateral Development Bank

NDA	National Designated Authority
NDC	Nationally Determined Contribution
NOL	No-objection Letter
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
PPP	Public-Private Partnerships
SDG	Sustainable Development Goals
TA	Technical assistance

—000—

Sepatah Kata

Halaman beranda situs National Designated Authority/NDA (Otoritas Nasional yang Ditunjuk) Indonesia untuk Green Climate Fund (GCF) menunjukkan jumlah portofolio GCF yang fantastis di Indonesia: USD 2,12 miliar dalam pendanaan GCF dan USD 10,49 miliar dalam dana pendamping (pendanaan proyek yang bersumber dari luar GCF), dengan total USD 12,61 miliar¹. Situs web NDA Indonesia juga menginformasikan bahwa pendanaan ditujukan untuk 15 proyek di Indonesia, dan 15,3 juta orang Indonesia mendapatkan manfaat dari sini. Angka-angka fantastis ini mendorong dilakukannya kajian terhadap pembiayaan dan proyek GCF di Indonesia. Fokusnya adalah dampaknya terhadap masyarakat. Pertanyaan kuncinya, apakah proyek bernilai miliaran dolar AS ini memberikan bantuan yang perlu bagi jutaan orang Indonesia yang menghadapi krisis iklim yang mendesak dan terus meningkat. Rasa urgensi ini mendorong perlunya tinjauan pustaka secara komprehensif terhadap proyek-proyek yang tercatat untuk Indonesia.

Aksi! for gender, social and ecological justice melakukan kajian pustaka atas 16 proyek yang tercatat untuk Indonesia, dari proyek yang pertama pada November 2018 hingga yang terakhir disetujui pada Maret 2024. Sumber informasi untuk kajian ini beragam, termasuk situs web GCF dan NDA Indonesia, serta situs web entitas GCF yang terakreditasi, pelaksana, dan pelaksana, serta sumber relevan lainnya.

Kajian ini menjelaskan secara singkat profil setiap proyek, termasuk apakah pendanaan berasal dari GCF dan co-financier (pembiayaan pendamping), Entitas Terakreditasi yang mengusulkan proyek dan Entitas Pelaksana, serta skala, jenis, dan area hasilnya; kemudian pendanaan GCF, pencairannya, dan pembiayaan bersama. Karena proyek GCF melibatkan proyek untuk satu negara dan juga untuk multi-negara, kajian ini juga menelusuri proyek mana yang hanya untuk Indonesia atau untuk beberapa negara. Untuk proyek multi-negara yang mencakup Indonesia, kajian ini mengeksplorasi fitur-fitur utama spesifik di Indonesia.

Umpan balik dari Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) yang memantau GCF melalui intervensi Active Observers (Pengamat Aktif) merupakan komponen penting dalam kajian ini. Umpan balik ini memastikan bahwa suara masyarakat yang terdampak perubahan iklim diintegrasikan kedalam proyek dan bahwa proyek relevan bagi masyarakat tersebut. Oleh karena itu, peninjauan juga mencakup intervensi CSO pada proyek yang diusulkan dan Rencana Aksi Gender (RAG) yang diusulkan.

Status implementasi adalah memeriksa perkembangan proyek yang tercatat untuk Indonesia dan kepatuhannya terhadap standar perlindungan, khususnya untuk subproyek, seperti analisis risiko, pengungkapan informasi yang tepat waktu, serta konsultasi dan persetujuan yang bermakna. Bagian ini melihat situs web GCF dan NDA Indonesia, entitas terakreditasi, dan pelaksana, serta sumber relevan lainnya. Kurangnya informasi dalam bagian ini akan menimbulkan tantangan dalam memantau proyek sehubungan dengan perkembangan, kepatuhan, dan manfaatnya.

Sejak Rapat Dewan ke-4 GCF pada bulan Oktober 2013, Aksi! telah terlibat aktif dalam memantau kegiatan mereka. Kami telah mengambil pendekatan proaktif, terlibat dengan NDA Indonesia untuk GCF dan menjangkau CSO Indonesia di tingkat nasional dan lokal. Kami telah berbagi pengalaman keterlibatan kami dengan berbagai

¹ Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal. NDA GCF. *National Designated Authority. Green Climate Fund Indonesia*. https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/en/kegiatan/portofolio/. Retrieve on 15 July 2024.

kelompok di tingkat nasional dan internasional serta mengembangkan materi untuk membangun kapasitas aktivis yang tertarik dalam memantau pendanaan iklim dari GCF. Dalam keterlibatan GCF dan NDA ini, kami bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan, kebutuhan, dan isu masyarakat yang terkena dampak dikomunikasikan secara efektif kepada para pembuat keputusan iklim di semua tingkatan. Kami berkomitmen untuk mengadvokasi kebijakan, program, dan aksi iklim yang tidak merugikan masyarakat, tetapi juga secara aktif memperkuat ketahanan mereka terhadap perubahan iklim dan mempromosikan solusi iklim.

Hasil tinjauan pustaka ini akan menjadi dasar bagi pemantauan berkelanjutan oleh Aksi! terhadap pendanaan iklim di Indonesia. Hasil ini akan memandu upaya advokasi kami untuk memperkuat suara masyarakat yang terdampak iklim dan pemangku kepentingan lain yang terdampak oleh proyek pendanaan iklim.

Jakarta, 30 April 2024

Titi Soentoro
Direktur Eksekutif

Sebuah Pengantar

Perkembangan Keterlibatan Indonesia dalam GCF

Indonesia terlibat aktif sejak awal GCF. Bambang Brojonegoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Indonesia, merupakan salah satu dari 24 anggota Dewan GCF pertama hingga 2013. Kemudian, disusul oleh Irfa Ampri, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Indonesia sejak Maret 2013 hingga November 2015 sebagai Anggota Dewan Alternatif. Irfa Ampri juga menjadi anggota Komite Manajemen Risiko. Selain itu, pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah Rapat Dewan ke-6 pada tanggal 19 - 21 Februari 2014 di Bali, di mana Bambang Brodjonegoro, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, mengumumkan akan menyumbang USD 250.000 kepada GCF. Janji ini menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang kedua yang menyumbang uang kepada GCF setelah Korea Selatan.

Di bawah Kantor Presiden Indonesia, Dewan Nasional Perubahan Iklim Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Keuangan dalam keterlibatan dengan GCF. Dewan ini juga merupakan NDA Indonesia yang pertama. Restrukturisasi pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Indonesia yang terpilih pada tahun 2015, menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi satu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan membentuk Direktorat Jenderal Perubahan Iklim yang baru. Pada bulan November 2015, Menteri Keuangan Indonesia menginformasikan GCF² bahwa Badan Kebijakan Fiskal di bawah Kementerian Keuangan bertindak sebagai National Designated Authority/NDA (Otoritas Nasional yang Ditunjuk) GCF. Pada tanggal 3 Agustus 2016, Dr. Suahasil Nazara, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Indonesia, ditunjuk untuk mewakili NDA Indonesia untuk GCF. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) Badan Kebijakan Fiskal, bertindak sebagai Sekretariat NDA di Indonesia. Sekretaris NDA GCF adalah Direktur PKPPIM.

Pada bulan Juni 2018, GCF menyetujui pendanaan pertama untuk Program Dukungan Kesiapan dan Persiapan (RPSP) di Indonesia. Berdasarkan penunjukan NDA, Global Green Growth Institute (GGGI) menjadi mitra pelaksana untuk melaksanakan RPSP. Program RPS ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas NDA, melibatkan pemangku kepentingan, memperkuat entitas akses langsung, mengembangkan alur proyek, dan memobilisasi investasi sektor swasta. Global Green Growth Institute (GGGI) adalah organisasi antarpemerintah internasional³ yang berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan. GGGI dan Pemerintah Indonesia menandatangani Kerangka Perencanaan Negara Indonesia (CPF) pada Oktober 2022.⁴ CPF merupakan komitmen terhadap aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada Investasi Hijau, Pertumbuhan Hijau dan Aksi Iklim, Hutan Berkelanjutan, Energi Terbarukan, dan Industri Hijau. Selain itu, GGGI juga dapat mengerjakan Solusi Programatik lainnya,

² GCF (November 2015). *National Designated Authority. Nomination Letter. Indonesia*. GCF. <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/nda-nomination-indonesia.pdf>

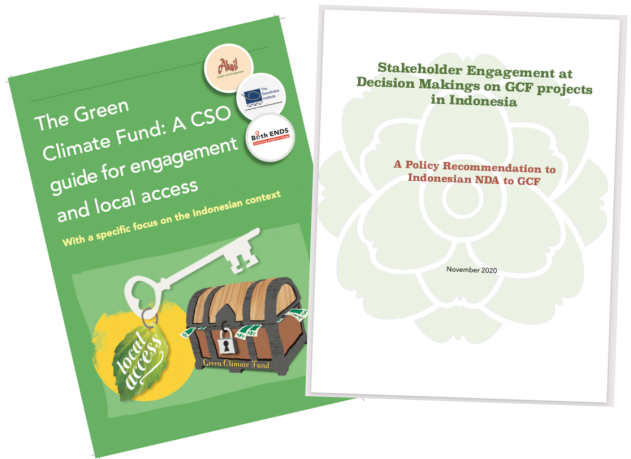
³ GGGI (2024). About GGGI. <https://gggi.org/about/>

⁴ GGGI (2024). Indonesia Country Planning Framework 2021-2025. <https://gggi.org/report/indonesia-country-planning-framework-2021-2025/>

termasuk Pertanian Tahan Iklim, Ketahanan Pesisir, Pengelolaan Limbah, dan Bangunan Hijau.

Saat ini, terdapat dua Entitas Akses Langsung Indonesia: (1) PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI), sebuah perusahaan negara di bawah Kementerian Keuangan Indonesia, menerima akreditasi dari GCF pada tanggal 14 Desember 2016; (2) Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan), mantan dana perwalian multidonor menjadi badan hukum independen pada tahun 2003 dan terdaftar sebagai asosiasi hukum perdata nirlaba. Kemitraan disetujui sebagai Entitas Terakreditasi GCF pada tanggal 27 Juli 2021. Kedua Entitas Terakreditasi Langsung (Direct Entities) tersebut belum mengusulkan proyek apa pun kepada GCF, meskipun SMI bertindak sebagai Entitas Pelaksana untuk AE internasional. Kegiatan Aksi! dalam Advokasi GCF dan NDASelain menghadiri Rapat Dewan GCF dan berkontribusi terhadap intervensi jaringan pengamat CSO, khususnya pada proyek-proyek yang diusulkan untuk Indonesia, Aksi! aktif di tingkat nasional dalam advokasi, penjangkauan, dan penguatan kapasitas CSO dan kelompok masyarakat Indonesia dalam pemantauan GCF dan NDA.

Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan:

- Penjangkauan dan peningkatan kapasitas bagi organisasi lokal dan kecil yang mengurus pendanaan publik serta yang mendukung inisiatif perempuan, khususnya untuk proyek iklim di daerah perkotaan dan pedesaan, serta CSO advokasi, telah memberikan dampak yang signifikan. Di antara pembicara dalam kegiatan tersebut ada perwakilan NDA Indonesia untuk GCF dan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 
- Setelah GCF menyetujui proyek geothermal dan REDD+ untuk Indonesia, kegiatan Aksi! melakukan tinjauan kritis terhadap proyek geothermal dan REDD+, dan mengeksplorasi peluang advokasi. Perwakilan Sekretariat NDA termasuk di antara para peserta, yang menggarisbawahi pentingnya keterlibatan mereka.
 - Aksi! mengusulkan mekanisme keterlibatan CSO kepada NDA. Usulan tersebut dibangun melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus dengan para aktivis, konsultan, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah yang memiliki pengalaman terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Aksi! membahas pengajuan tersebut dengan kantor NDA dan konsultannya, GGGI.
 - Terlibat dalam kegiatan NDA Indonesia seperti pertemuan tatap muka dan berbagai pertemuan yang diselenggarakan oleh NDA mengenai program negara, tinjauan tahunan, dan beberapa proposal proyek.
 - Publikasi materi pengembangan kapasitas seperti buku pegangan GCF berdasarkan konteks Indonesia pada tahun 2016⁵, and Handbook of GCF project monitoring in 2023.

⁵ Buku Manual GCF pada http://www.bothends.org/uploaded_files/document/1CSOguide_on_the_GCF_November_2016.pdf

Mengapa Advokasi GCF dan NDA Penting?

GCF, sebagai salah satu entitas pelaksana mekanisme keuangan UNFCCC dan Perjanjian Paris, berperan penting dalam aksi iklim. Urgensi menangani krisis iklim ditegaskan oleh fakta bahwa pada COP 15 di Kopenhagen tahun 2009, negara industri maju sepakat untuk memobilisasi USD 100 miliar setiap tahun pada tahun 2020 untuk mendukung aksi iklim di negara berkembang. Pada tahun 2015, berdasarkan Perjanjian Paris, Para Pihak sepakat memperpanjang target ini hingga tahun 2025. Pendanaan iklim ini sangat penting untuk investasi mengurangi emisi secara signifikan, untuk mampu beradaptasi dengan dampak buruk perubahan iklim, dan meningkatkan ketahanan terhadap krisis iklim. Hingga 31 Juli 2020, GCF telah mengumpulkan USD 10,3 miliar dalam bentuk janji dari 49 negara/wilayah/kota.⁶ Karenanya, penting untuk memantau GCF karena merupakan bentuk pemenuhan tanggung jawab historis negara industri maju.



Seri webinar untuk pemantauan dan advokasi GCF

Siklus hidup proyek GCF⁷, secara umum, dapat dilihat dalam tiga tahap: (1) tahap persiapan proyek di tingkat negara, di mana NDA memainkan peran kunci. NDA biasanya berada di bawah Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, atau kementerian lain yang ditunjuk pemerintah. (2) tahap pertimbangan proyek adalah saat GCF memutuskan persetujuan, kebijakan, program, atau proyek; (3) tahap pasca-persetujuan adalah saat pemrakarsa melaksanakan proyek.

Keterlibatan dengan GCF sama pentingnya di ketiga tingkatan: tingkat nasional (tahap 1), tingkat Dewan/Sekretariat GCF (tahap 2), dan tahap implementasi oleh para pelaksana (tahap 3). Kita harus meningkatkan dukungan dan upaya kita untuk terlibat

⁶ GCF. Initial Resource Mobilisation. <https://www.greenclimate.fund/about/resource-mobilisation/irm>

⁷ GCF (July 2020). GCF Programming Manual. An introduction to the Green Climate Fund project cycle and project development tools for full-size projects. GCF. <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-programming-manual.pdf>

dalam Tahap 1 dan Tahap 3, sambil mempertahankan kerja advokasi yang sangat baik dari rekan-rekan CSO kita di Tahap 2. Keberhasilan memantau proyek-proyek GCF tergantung pada pendekatan yang komprehensif yang memastikan keterlibatan kita di semua tingkatan.

Governing Instrument (Instrumen Tata Kelola) GCF menetapkan bahwa GCF mengupayakan dan menyediakan akses ke pembiayaan iklim melalui pendekatan 'berdasarkan kepentingan negara' (*country-driven approach*) dengan membangun mekanisme NDA dan *focal point*. NDA, pemain penting dalam siklus proyek GCF, mengembangkan program iklim untuk GCF (*country program*), melaksanakan 'prosedur tanpa keberatan' (*no-objection procedure*), dan melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam negeri. Setiap proposal proyek yang dilaksanakan di suatu negara oleh Entitas Terakreditasi mana pun, baik internasional, regional, atau Entitas Akses Langsung (*Direct Entity*), harus memperoleh 'Surat Tidak Keberatan' (*No-Objection Letter/NOL*) dari NDA. Surat ini menegaskan bahwa proposal proyek tersebut selaras dengan prioritas adaptasi dan mitigasi negara tersebut dan, karenanya, didukung oleh negara tersebut. Peran NDA sangat penting, dan keterlibatan kita dengan NDA sangatlah penting.

Keterlibatan tersebut harus dalam (1) proses penyusunan 'Dokumen Program Negara' (*Country Program Document*) untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan masyarakat terdampak iklim menjadi bagian dari program negara tersebut, bukan hanya kepentingan tingkat kementerian; (2) proses pembahasan NOL untuk proposal proyek. Artinya, kita harus terlibat dalam mengkaji proposal proyek yang dikordinasi NDA. (3) Tinjauan Kinerja Tahunan NDA merupakan arena untuk memberikan umpan balik tentang kegiatan NDA. Instrumen Tata Kelola GCF memastikan keterlibatan pemangku kepentingan, dalam hal ini CSO, dalam pengembangan, perancangan, dan implementasi kegiatan yang didanai GCF. Kita harus menempati ruang ini. Kita harus mengubah persepsi 'kepemilikan negara' (*country ownership*) menjadi kepemilikan oleh rakyat (*people's ownership*), bukan pemerintah saja.

Bagaimana dengan Tahap 3, keterlibatan pada tahap pasca-persetujuan proyek? Tahap ini perlu banyak perhatian karena di sinilah kita memeriksa realitas implementasi proyek dalam hal sejauh mana proyek tersebut menguntungkan masyarakat yang terdampak iklim atau lebih menguntungkan investor dan perantara keuangan yang tercipta melalui proyek tersebut. Tinjauan pustaka terhadap 16 proyek yang terdaftar untuk Indonesia hingga Maret 2024 ini menunjukkan realitasnya.

—000—

Daftar Isi

	Page
Executive Summary	2
Abbreviation	8
Preface	10
An Introduction	12
Table of contents	15
Project Reviews	16
1. FP 083 Indonesia Geothermal Resource Risk Mitigation Project	18
2. FP 099 Climate Investor One	23
3. FP 130 Indonesia REDD-plus RBP for Results period 2014-2016	26
4. FP 151 Global Subnational Climate Fund (SnCF Global) – Technical Assistance (TA) Facility	30
5. FP 152 Global Subnational Climate Fund (SnCF Global) – Equity	34
6. FP 156 ASEAN Catalytic Green Finance Facility (ACGF): Green Recovery Program	38
7. FP 180 Global Fund for Coral Reefs Investment Window	43
8. FP 190 Climate Investor Two	46
9. FP 194 Programme for Energy Efficiency in Buildings (PEEB) Cool	49
10. FP 196 Supporting Innovative Mechanisms for Industrial Energy Efficiency Financing in Indonesia with Lessons for Replication in other ASEAN Member States	52
11. FP 197 Green Guarantee Company ("GGC")	56
12. FP 204 Sustainable Renewables Risk Mitigation Initiative (SRMI) Facility (Phase 2 Resilience focus) [SRMI-Resilience]	59

13. FP 212 &Green Fund: Investing in Inclusive Agriculture and Protecting Forests	63
14. FP 215 Community Resilience Partnership Program	66
15. FP 223 Project GAIA ("GAIA")	68
16. FP 225 E-Mobility Program	70
Glossary	74

Kajian Proyek

Profil Proyek -1 	Proposal Pendanaan ini ditujukan untuk meningkatkan investasi dalam pengembangan energi panas bumi di 20 lokasi di Indonesia melalui (1) pendirian fasilitas pembiayaan baru, dan (2) bantuan teknis dan penguatan kapasitas. Fasilitas ini akan menyediakan pembiayaan bersyarat dan pinjaman lunak untuk pengeboran konfirmasi sumber daya. Negara: Indonesia Area hasil: pembangkitan dan akses energi Mitigasi, Kategori ESS: Intermediasi 1, Skala besar Entitas Terakreditasi: Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan dan Asosiasi Pembangunan Internasional (Bank Dunia) Entitas Pelaksana: PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persetujuan: 20 Oktober 2018 di BM21 Perkiraan masa pakai: 10 tahun https://www.greenclimate.fund/project/fp083
Pembiayaan	Sektor publik Total nilai proyek: USD 510 juta IBRD (pinjaman USD 325 juta), Pembiayaan GCF: pinjaman lunak USD 25 juta, hibah yang dapat diganti sebesar USD 150 juta, dan hibah USD 10 juta Pencairan Pembiayaan GCF: USD 100 juta (100%)
Fitur Utama Proyek untuk Indonesia	1. Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi: USD 500 juta dari IBRD dan GCF (dengan pembiayaan paralel sebesar US\$150 juta dari Pemerintah Indonesia). SMI, melalui Fasilitas tersebut, akan menyediakan pembiayaan utang bagi pengembang panas bumi untuk pengeboran konfirmasi sumber daya mereka melalui (i) pemberian pinjaman lunak kepada pengembang sektor publik, dan (ii) pemberian pinjaman kepada pengembang swasta dan langganan obligasi konversi yang diterbitkan oleh pengembang sektor swasta, untuk digunakan bersama ekuitas pengembang swasta. 2. Bantuan Teknis dan Pengembangan Kapasitas (USD10 juta dari Green Climate Fund) akan membiayai program dukungan multi-tahun untuk menutupi biaya operasional tambahan dan meningkatkan kapasitas SMI dalam mengelola Fasilitas. Program ini juga akan membangun kapasitas dalam pemangku kepentingan sektor utama dan memberikan dukungan bantuan teknis untuk meningkatkan tata kelola sektor secara keseluruhan dan iklim investasi untuk pengembangan panas bumi di Indonesia. Informasi proyek: https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/funding-proposal-fp083-world-bank-indonesia.pdf

Pendapat CSOs mengenai proposal proyek	• Pelanggaran terhadap Kebijakan Pengungkapan Informasi dan Lingkungan dan Sosial milik GCF sendiri, yang mengharuskan pengungkapan informasi 120 hari sebelumnya • Jaminan yang tidak memadai bahwa subproyek akan mempertimbangkan isu lingkungan, sosial, Masyarakat Adat, dan gender • Tidak ada penilaian tentang potensi letusan gunung berapi dan gempa bumi akibat pengeboran panas bumi karena lokasi Indonesia di Cincin Api, sabuk gunung berapi tempat sekitar 90 persen dari semua gempa bumi dan letusan gunung berapi terjadi. Sekitar 70% dari potensi cadangan panas bumi Indonesia berada di ekosistem hutan yang rapuh. • Tidak ada informasi tentang lokasi 20 proyek panas bumi yang mungkin didukung dan komunitas mana yang akan terkena dampak. • Kekhawatiran tentang akuntabilitas Bank Dunia secara keseluruhan karena tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan subproyek setelah sepuluh tahun. • Tidak ada informasi dan konsultasi dengan masyarakat dari lokasi proyek potensial, serta konsultasi publik oleh NDA Indonesia Intervensi CSO mendukung seruan 84 CSO Indonesia dan 19 CSO internasional pendukung kepada GCF untuk tidak menyetujui proposal ini. https://www.gcfwatch.org/wp-content/uploads/2020/01/CSO-Comments-on-FP083-World-Bank-Indonesia-BM21-Oct2018.pdf
--	---

Rencana Aksi Gender (RAG)	• Dampak gender dari proyek: Meningkatnya lapangan kerja perempuan sebagai hasil dari penciptaan lapangan kerja baru di bawah Proyek: meningkatnya suara dan agensi perempuan melalui pemberdayaan ekonomi; • Hasil gender: Perubahan pengetahuan dan keterampilan pekerja perempuan dalam berpartisipasi di sektor panas bumi, akses terhadap energi oleh kedua jenis kelamin, serta berkurangnya risiko dan dampak buruk bagi masyarakat yang terdampak proyek. • Keluaran gender: Keseimbangan gender tenaga kerja pengembang; Rekomendasi tindakan yang peka gender dalam Manual Operasional Proyek untuk ditelusuri oleh pengembang dan diawasi oleh PT SMI; Kepatuhan terhadap persyaratan inklusi sosial dan perlindungan https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gender-action-plans-fp083-world-bank-indonesia.pdf Status Implementasi RAG Belum ada aplikasi proyek formal, jadi belum ada implementasi GAP yang perlu dilaporkan. Proyek pada tahap pra-aplikasi diharapkan memulai penyusunan GAP pada tahap aplikasi. Laporan Kinerja Tahunan 2022 untuk FP083: Proyek Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi Indonesia tertanggal 18 Februari 2023 di: https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/disclosable-fp083-annual-performance-report-cy2022-v.pdf Pandangan CSO terhadap RAG • Kurangnya dampak gender dan penilaian risiko dari proyek berisiko tinggi terhadap lingkungan ini. • Rencana aksi gender dari proposal ini terlalu umum, kurang memiliki wawasan mendalam tentang situasi perempuan di Indonesia, dan gagal menganalisis masalah gender di sektor panas bumi. • Proposal tersebut mengklaim untuk memberdayakan perempuan melalui peningkatan akses ke listrik dan pekerjaan tetapi tidak ada yang menyebutkan tentang akses dan kendali atas tanah dan pengambilan keputusan terkait sumber daya. • Kurangnya mekanisme penyelesaian berdasarkan strategi gender Bank Dunia yang memperhitungkan risiko dan bahaya yang dapat timbul dari proyek berisiko tinggi tersebut. • Kurangnya informasi tentang rencana atau mekanisme penanggulangan/pengelolaan bencana domestik Indonesia untuk mengatasi kerusakan pembangkit listrik atau ketentuan gender untuk bahaya akibat pekerjaan/paparan. https://www.gcfwatch.org/project-tracker/fp083-indonesia-geothermal-resource-risk-mitigation-project
---	--

Status Implementasi	On World Bank website: Di situs web Bank Dunia: PT. SMI dan Entitas Pelaksana menerima dua aplikasi Pra-Proposal GREM pertama dari PT. Geo Dipa Energi (GDE) pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023. Aplikasi formal diharapkan akan diserahkan ke Bank Dunia pada bulan Desember 2023. Uji tuntas teknis dan persiapan instrumen pengamanan sedang berlangsung, dan persetujuan proposal pendanaan diharapkan pada bulan Desember 2023/Januari 2024, tergantung pada penyelesaian instrumen pengamanan dan dokumen teknis. Dalam konteks Bantuan Teknis dan Penguatan Kapasitas, Bank Dunia menyiapkan kerangka Regulasi dan kapasitas kelembagaan yang kondusif bagi investasi panas bumi seperti Penetapan Harga Energi Terbarukan. Bank juga menyiapkan Peta Jalan Kemitraan Panas Bumi untuk PLN. Versi yang Dapat Diungkapkan dari Laporan Status dan Hasil Pelaksanaan (ISR) - Proyek Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi Indonesia (GREM) - P166071 - Nomor Urutan: 08, 2023/09/05 di https://documents1.worldbank.org/curated/en/099090523114541933/pdf/P16607108dbeb505308891029017376e189.pdf Di situs web GCF: Laporan Kinerja Tahunan terbaru tertanggal 18 Februari 2023 di: https://www.greenclimate.fund/document/2022-annual-performance-report-fp083-indonesia-geothermal-resource-risk-mitigation-project : • Dari 1 Januari hingga 31 Desember 2022, Manual Operasional (OM) telah diselesaikan dan diterjemahkan menjadi Manual Pengembang (DM) yang memungkinkan pengembang panas bumi mengakses informasi terperinci mengenai fasilitas GREM. • Proyek sedang dilaksanakan tetapi pekerjaan di lapangan belum dimulai • Meskipun SMI belum menerima aplikasi apa pun, SMI telah melakukan penyaringan pra-aplikasi risiko lingkungan dan sosial untuk prospek eksplorasi Candi Umbul Telomoyo di Jawa Tengah dan Cimanggu (Patuha Utara): • Kunjungan lapangan ke fasilitas eksplorasi dan pembangkitan energi (Patuha I) dan prospek eksplorasi Candi Umbul Telomoyo bersama tim Bank Dunia; • Staf menghadiri sesi pelatihan pelatih Bank Dunia tentang OP4.04 Habitat Alami, Penilaian Dampak Kumulatif, Keterlibatan Pemangku Kepentingan, dan Fasilitas Terkait; • Manajer risiko SMI dan Penasihat Pengamanan Regional (RSA) Bank Dunia telah bertemu untuk membahas manajemen risiko di tingkat perusahaan sebagai acara berbagi pengetahuan. Di situs web SMI: Informasi umum tentang proyek dengan bagan tentang struktur keuangan, alur skematis dana di bawah jendela privat dan publik GREM; dan kriteria umum penerima fasilitas GREM. https://ptsmi.co.id/strategic-cooperation/grem Revisi Manual Pengembang Proyek Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi Indonesia dari November 2022. https://ptsmi.co.id/cfind/source/files/grem/dm-revision-grem-developer-manual-november-2022.pdf
-----------------------------------	--

Tantangan dalam Pemantauan	Kurangnya informasi dan informasi yang sudah ketinggalan zaman tentang status pelaksanaan proyek Informasi di situs web GCF: • Informasi yang dilaporkan sebagian bersifat rahasia; pembaruan terakhir adalah dari 18 Februari 2023. • Informasi terbaru di situs web Bank Dunia, Versi ISR yang 'Dapat Diungkapkan', tertanggal 9 Mei 2023 Informasi di situs web NDA Indonesia: • Hanya berisi dokumen berbahasa Inggris yang terkait dengan proposal proyek oleh Bank Dunia kepada GCF. • Tidak ada informasi terbaru tentang proyek tersebut. https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/geothermal-resource-risk-mitigation-grem-project/ Informasi di situs web PT. SMI sebagai Entitas Pelaksana: https://ptsmi.co.id/kerjasama-strategis/grem adalah tentang struktur dan skema proyek dan Panduan Pengembang yang diperbarui (November 2022). Tidak ada informasi terbaru tentang proyek tersebut.
--	---

Profil Proyek -2 	Climate Investor One (CIO) adalah fasilitas keuangan campuran yang terdiri dari dua komponen: (1) dana pengembangan, yang menyediakan pinjaman pada tahap awal siklus hidup proyek, dan (2) dana ekuitas konstruksi, yang akan memenuhi hingga 75 persen dari total biaya konstruksi bersama dengan sponsor proyek. Teknologi inti yang akan didukung adalah tenaga surya fotovoltaik, tenaga angin darat, dan tenaga air run-of-the-river. CIO terdiri dari dua dana yang terpisah tetapi saling terkait secara operasional: (1) Dana Pengembangan CIO untuk menyediakan pinjaman pengembangan guna mendanai pengembangan tahap awal siklus hidup proyek; (2) Dana Ekuitas Konstruksi (CET) untuk membiayai tahap konstruksi siklus hidup proyek dengan solusi ekuitas penuh. Negara: Burundi, Kamerun, Djibouti, Indonesia, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mongolia, Maroko, Nigeria, dan Uganda Area hasil: Pembangkitan dan akses energi Mitigasi, Kategori ESS: Intermediasi 1, Skala besar Entitas Terakreditasi: Bank Pembangunan Wirausaha Belanda, Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) Entitas Pelaksana: Climate Fund Managers (CFM) Entitas Pelaksana: Shire Oak Asia Green Pte. Ltd Persetujuan: 20 Oktober 2018 Perkiraan masa berlaku: 20 tahun Informasi proyek: https://www.greenclimate.fund/project/fp099
Pembiayaan	Sektor swasta Total nilai proyek: USD 821,5 juta Pembiayaan GCF: hibah USD 100 juta Pembiayaan bersama: Dana Pembangunan: hibah yang dapat diganti sebesar USD 26,5 juta; Dana Ekuitas Konstruksi CIO (CEF) - Tingkat 1: hibah yang dapat diganti sebesar USD 75 juta; CEF- Tingkat 2: ekuitas biasa USD 310 juta; CEF – Tingkat 3: ekuitas senior USD 310 juta. Pencairan pembiayaan GCF: USD 100 juta (100%) Private sector
Fitur Utama Rencana Proyek untuk Indonesia	Tidak ada informasi mengenai fitur spesifik proyek untuk Indonesia.

Pandangan CSO mengenai proposal proyek	• Anehnya, proposal tersebut akan memberikan hibah yang dapat diganti sebesar USD 100 kepada entitas internasional ketika banyak entitas nasional langsung sering diberikan pinjaman. • Ketidakpastian tentang jenis subproyek energi terbarukan yang ingin didanai menjadi masalah. Proposal tersebut menyebutkan tenaga surya, angin, dan tenaga air sungai sebagai area target utama tetapi tidak secara eksplisit mengecualikan jalur energi 'terbarukan' yang sangat tidak diinginkan seperti biomassa dan tenaga termal. Tanpa daftar pengecualian yang jelas dari aktivitas dalam proposal ini, proyek berisiko tinggi atau menengah yang berpotensi bermasalah akan dilaksanakan. • FMO harus mengartikulasikan dengan jelas komitmennya mengenai pengungkapan, pembagian informasi, keterlibatan pemangku kepentingan, Kebijakan Masyarakat Adat GCF, dan penyelesaian keluhan dalam Perjanjian Aktivitas yang Didanai atau diformalkan secara hukum secara tertulis. • FMO, CFM, dan CIO harus memberi tahu masyarakat yang berpotensi terkena dampak tentang mekanisme penyelesaian keluhan yang disebutkan dalam proposal yang akan disediakan secara independen dan dapat diakses di berbagai tingkatan. https://www.gcfwatch.org/project-tracker/fp099-climate-investor-one
Rencana Aksi Gender (RAG)	• Pengaturan program dan kebijakan di tingkat pengelola dana: penguatan kapasitas staf, kebijakan dan pengaturan gender dan inklusi sosial; membangun infrastruktur integrasi gender program; • Integrasi gender di tingkat pengembangan dan konstruksi proyek: perekrutan perempuan dalam proyek yang didanai CIO, keterlibatan dan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, melahirkan rencana keterlibatan pemangku kepentingan (SEP), merancang tindakan manajemen dan pemantauan sosial yang inklusif, inisiatif pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat; • Pemantauan dan evaluasi di tingkat umur investasi: pengembangan rencana pemantauan dan evaluasi di tingkat program dan proyek, tinjauan kinerja terhadap rencana aksi inklusif gender dan indikator responsif gender, pemantauan implementasi tindakan terkait gender termasuk dalam SEP dan ESMP, dan pemantauan mekanisme pengaduan. https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gender-action-plan-fp099-fmo-multiple-countries.pdf dated 10 January 2019. Status Implementasi RAG Tidak ada informasi tentang status implementasi GAP Laporan Kinerja Tahunan 2022 untuk FP099: Climate Investor One tertanggal 4 April 2023 di https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/cy2022-apr-fp099-disclosable-version.pdf Pandangan CSOs tentang RAG Indikator utama yang disebutkan adalah jumlah listrik yang dapat dihasilkan, jumlah orang yang dapat dilayani, dan potensi emisi GRK yang dapat dihindari. Ini tidak akan secara otomatis diterjemahkan ke dalam memastikan akses energi dengan cara yang responsif gender. Jadi siapa yang akan benar-benar mendapat manfaat dari energi yang akan dihasilkan? https://www.gcfwatch.org/project-tracker/fp099-climate-investor-one

Status Implementasi	Komite investasi menyetujui pengembangan perluasan proyek sebesar 33MW untuk platform tenaga surya atap komersial dan industri (C&I) yang ada di Indonesia. ESMS dan pengaturan tata kelola lainnya akan diterapkan pada proyek di Indonesia untuk mengelola kepatuhan terhadap PS IFC dan persyaratan hukum serta persyaratan lainnya. CFM akan melakukan audit berkala untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan.. Laporan Kinerja Tahunan (APR) 2020 tanggal 1 Maret 2021 di: https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/fp099-annual-performance-report-2020.pdf Climate Investor One telah melakukan investasi pada portofolio proyek pembangkit listrik tenaga surya atap di Vietnam dan Indonesia, yang sedang dikembangkan oleh Green Roof. Green Roof adalah entitas yang berbasis di Singapura dengan tim manajemen lapangan di Vietnam dan Indonesia, dan rekam jejak perintis pengembangan pembangkit listrik tenaga angin dan surya di Eropa. Climate Fund Managers (manajer dana CIO Fund) telah berinvestasi dalam portofolio proyek pembangkit listrik tenaga surya atap sebesar 110 MW di kawasan industri dekat Jakarta dan Surabaya di Indonesia. Shire Oak Asia Ptr.Ltd mengembangkan dan akan menghasilkan energi terbarukan dari tenaga surya untuk penggunaan listrik di lokasi. https://climatefundmanagers.com/wp-content/uploads/2021/04/210420_Shire-Oak_C-ESMP_FINAL_English.pdf
Tantangan dalam Pemantauan	Kurangnya informasi mengenai status pelaksanaan proyek. Informasi yang tersedia untuk umum di website terkait adalah sebagai berikut: • Informasi di website GCF: setelah laporan ESS pada 21 April 2021, tidak ada update dan informasi lebih lanjut mengenai proyek di Indonesia • Tidak ada informasi terkini di situs web FMO mengenai proyek maupun implementasi ESMS, di https://www.fmo.nl/products-and-services • Tidak ada informasi mengenai proyek ini di situs Shire Oak Asia di: https://climatefundmanagers.com/portfolio/green-roof-vietnam-indonesia-ci-solar/ • Tidak ada informasi mengenai proyek ini di situs Shire Oak Asia di: https://shireoakinternational.asia

Profil Proyek -3 	Indonesia akan menggunakan dana ini untuk memperkuat koordinasi, implementasi, dan keseluruhan arsitektur Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+), mendukung desentralisasi pengelolaan hutan berkelanjutan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Hutan Desa serta pengelolaan proyek. Karena ini adalah proyek Pembayaran Berbasis Hasil (RBP), tidak diperlukan kerangka kerja dan target hasil. Negara: Indonesia Daerah capaian: Penggunaan hutan dan lahan Mitigasi, Kategori Perlindungan Sosial dan Lingkungan: skala menengah Entitas Terakreditasi: United Nations Development Program (UNDP) Entitas Pelaksana: Kementerian Keuangan Indonesia adalah Entitas Pelaksana Proyek ini melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) Persetujuan: 21 Agustus 2020 Informasi proyek: https://www.greenclimate.fund/project/fp130
Fembiayaan	Sektor Publik Pembiayaan GCF: RBP (2014-2016) USD 103.8 million. Pencairan: 100%
Fitur utama Rencana Proyek di Indonesia	Kegunaan RBP REDD+ adalah untuk: 1. Terus memperbarui, membangun, dan memperkuat arsitektur REDD+ dan semakin memperkuat kapasitas pemerintah untuk mengoordinasikan dan melaksanakan REDD+ secara nasional. 2. Memperluas dan meningkatkan operasionalisasi Perhutanan Sosial dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang memberikan kontribusi besar terhadap tujuan ganda pengelolaan dan rehabilitasi hutan lestari, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/fp130-undp-indonesia_0.pdf

Pendapat CSOs tentang proposal proyek	Menurut CSO, proposal proyek tersebut belum siap untuk dapat disetujui dalam Rapat Dewan GCF 28 karena alasan berikut: • Dasar proposal tersebut tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat lokal dan masyarakat adat, juga tidak mengatasi penyebab sebenarnya dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. • Ketidakkonsistenan pada tingkat referensi emisi hutan (FREL)/dasar dan tidak adanya perlindungan yang lengkap, menyebabkan proyek tidak dapat melindungi dan menegakkan hak-hak masyarakat adat. • Klaim proposal mengenai keberhasilan penanggulangan deforestasi di Indonesia dan pengurangan remisi selama 2012 - 2017 dipertanyakan karena laju deforestasi meningkat justru di hutan alam. • Menghormati hak-hak masyarakat adat masih menjadi tantangan besar di Indonesia karena kebijakan tata guna lahan, perizinan kehutanan, dan pertanian tidak menghormati/mengakui hak-hak masyarakat adat. Sekitar 40 proyek percontohan dan kegiatan demonstrasi REDD+ sedang dikembangkan, tetapi negosiasi dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal yang terkena dampak, belum pernah selesai. Proyek ini berpotensi mengulangi kegagalan proyek percontohan dan kegiatan demonstrasi REDD+ yang ada, di mana tidak melibatkan masyarakat adat secara memadai, termasuk penerapan free, prior and informed consent (FPIC), sementara pemerintah telah mengeluarkan izin. • Program Perhutanan Sosial memungkinkan masyarakat adat mengakses hak terhadap sumber daya hutan, tetapi tidak hak atas kepemilikan tanah, hutan, dan sumber daya. https://docs.google.com/document/d/1We21_OL1Jjj07CYeYvCpvNSS30WhP2P1Pvi769VYXH0/edit
---	---

Rencana Aksi Gender (RAG)	Sebagai titik masuk untuk tindakan yang responsif gender, GAP akan memastikan: - analisis gender untuk menginformasikan perencanaan dan implementasi proyek responsif gender; - akses setara untuk kegiatan dan manfaat proyek; - akses setara untuk proses pengambilan keputusan di semua tingkatan; - peningkatan akses perempuan terhadap aset produktif; - pengumpulan data terpilah gender secara sistematis, termasuk pemantauan dan evaluasi manfaat, langkah-langkah untuk menghindari potensi risiko proyek, seperti hilangnya akses perempuan ke sumber daya hutan dan mekanisme pembagian manfaat yang tidak setara. Selain itu, ada usulan indikator khusus untuk mengukur dan melacak kemajuan rencana ini di tingkat kegiatan. Indikator ini juga akan memberikan rekomendasi konkret untuk memastikan gender (termasuk data terpilah) terus dikumpulkan dan diukur selama implementasi. Laporan Rencana Aksi Gender tanggal 7 September 2020: https://www.greenclimate.fund/document/gender-action-plan-fp130-indonesia-redd-plus-rbp-results-period-2014-2016 Status Implementasi RAG RAG diperbarui melalui masukan dari konsultasi publik yang diadakan pada tahun 2021 dan 2022 dan diserahkan kepada GCF untuk ditinjau. GCF mengirimkan persetujuan tertulis pada tanggal 25 November 2022 untuk GAP yang diperbarui. Sejak saat itu, proyek telah mulai menerapkan GAP yang diperbarui ini. RAG yang diperbarui berisi kegiatan tambahan untuk mengurangi potensi risiko yang teridentifikasi seputar kekerasan berbasis gender dan penggunaan/beban waktu perempuan. Ini menjadi referensi informatif untuk mengembangkan dan menerapkan kegiatan terkait gender dalam rencana kerja tahunan. Lebih jauh, pendekatan gender sepenuhnya terintegrasi ke dalam Metodologi Validasi (VM) untuk modalitas PBP (Pembayaran Berbasis Hasil). Hal ini memungkinkan proyek untuk mengumpulkan data yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin seputar upaya partisipasi dan konsultasi di area yang mencari PBP, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan meningkatkan responsivitas gender dari proses konsultasi yang terkait dengan MPI. Di tingkat kelembagaan, Satgas Gender dibentuk di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dan Satgas Gender di BPD LH pada tahun 2022. Satgas Gender BPD LH akan beranggota perwakilan dari setiap divisi, dan upaya untuk mengoperasionalkannya akan berlanjut pada awal tahun 2023. Satgas tersebut akan membantu menerapkan RAG yang diperbarui untuk proyek tersebut dan mengoordinasikan upaya proyek tentang gender dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/fp130-annual-performance-report-cy2022-v.pdf
---	--

	Pandangan CSO terhadap RAG Meskipun RAG bersifat komprehensif, dengan tindakan responsif gender yang terperinci untuk setiap kegiatan proyek, targetnya tidak cukup ambisius. RAG tidak tanggap terhadap tantangan struktural yang dihadapi dalam pengarusutamaan gender dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, tidak hanya sebagai pelaksana proyek di akhir proyek. Kelompok Kerja Kehutanan dan Gender yang disebutkan dalam proposal proyek hanya aktif dalam pelaksanaan proyek tetapi tidak pada tingkat pengambilan keputusan. Jika Indonesia, sejak tahun 2000 (ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan pengarusutamaan gender), hanya menunjukkan sedikit kemajuan dalam pengarusutamaan gender dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan/tindakan pembangunan dan iklim, bagaimana rencana aksi gender proyek UNDP akan mencapai target yang disebutkan? Proses dan langkah-langkah untuk mencapai target tersebut juga harus dielaborasi dan diintegrasikan kembali ke dalam proposal proyek. https://docs.google.com/document/d/1We21_OL1Jjj07CYeYvCpVNSS30WhP2P1Pvi769VYXH0/edit
Status Implementasi	Kemajuan utama adalah membantu BPD LH dalam membangun kapasitas dan sistem tingkat nasional untuk menerapkan dan memantau perlindungan, yang membuka jalan bagi penerapan dukungan dalam desentralisasi tata kelola hutan berkelanjutan. Proyek ini juga mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam memperkuat kondisi untuk memperbarui dan menerapkan arsitektur REDD+, seperti: perencanaan dan modifikasi mengenai Implementasi Nilai Ekonomi Karbon, penyusunan peraturan tentang Penyusunan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai, dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Proyek ini juga mendukung persiapan dan penyesuaian yang diperlukan dalam mandat berbagai direktorat untuk Kontribusi Nasional yang Ditetapkan (NDC) yang diperbarui yang diajukan pada Juli 2021 dan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon (PerPres tentang NEK) yang ditandatangani pada Oktober 2021. Laporan Kinerja Tahunan 2022 untuk FP130: Indonesia REDD-plus RBP untuk periode hasil 2014-2016 tertanggal 10 Agustus 2023 di: https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/fp130-annual-performance-report-cy2022-v.pdf

Tantangan dalam Pemantauan	Di situs GCF: Dokumen terbaru yang diterbitkan adalah Laporan Kinerja Tahunan 2022 untuk FP130:Indonesia REDD-plus RBP untuk periode hasil 2014-2016 tertanggal 10 Agustus 2023. Di situs UNDP: Deskripsi ringkas tentang proyek. Tautan yang disediakan untuk Penilaian Lingkungan dan Sosial, Prosedur Penyaringan Sosial dan Lingkungan, Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tidak berfungsi lagi. https://www.undp.org/indonesia/environmental-and-social-safeguards-disclosure-indonesia-redd-rbp-proposal ESMP menyajikan kerangka kerja terperinci untuk mengelola dampak dan risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan proyek 'Pembayaran Berbasis Hasil (RBP) REDD+ Indonesia untuk periode hasil 2014-2016' https://www.undp.org/indonesia/publications/environmental-and-social-management-plan-esmp-gcf-project-indonesia-redd-results-based-payment-rbp-results-period-2014-2016 Di situs NDA Indonesia: Informasi umum terkait proposal proyek, tidak ada informasi terkini tentang proyek. https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/pembayaran-berbasis-hasil-redd-indonesia-untuk-periode-hasil-2014-2016/
--	--

Profil Proyek -4 	Meskipun beberapa Anggota Dewan GCF menyampaikan kekhawatiran terhadap proposal ini, BM 27 tetap menyetujui proposal sektor swasta dari Dana Iklim Subnasional Global (SnCF Global) – Fasilitas Bantuan Teknis (TA). Dana Iklim Subnasional adalah dana payung untuk penyebaran proyek-proyek berdampak sosial dan lingkungan yang tinggi di tingkat subnasional seperti air dan sanitasi, optimalisasi limbah, energi terbarukan yang terdesentralisasi, efisiensi energi, pertanian berbasis alam, dan kota pintar (e-mobilitas). Dana ini memanfaatkan bantuan teknis dan Blended Finance untuk mempercepat pengembangan dan investasi dalam portofolio proyek infrastruktur berkelanjutan yang dapat dibiayai bank. SnCF adalah langkah pertama menuju inisiatif yang lebih besar yang bertujuan untuk meningkatkan dan mereplikasi dana infrastruktur berkelanjutan. Negara: 42 negara • Afrika: Burkina Faso; Kamerun; Pantai Gading; Republik Demokratik Kongo; Gabon; Guinea; Kenya; Mali, Mozambik; Nigeria; Rwanda; Senegal; Afrika Selatan; Togo; Uganda. • Asia-Pasifik: Kamboja; Fiji; Indonesia; Myanmar. • Amerika Latin dan Karibia: Bahama; Brasil; Chili; Kosta Rika; Dominika; Republik Dominika; Ekuador; El Salvador; Guatemala; Haiti; Honduras, Jamaika; Meksiko; Panama; Uruguay. • Mediterania: Albania; Yordania; Lebanon, Mauritania; Montenegro; Maroko; Makedonia Utara; Tunisia. Area hasil: (1) Bangunan, kota, industri, dan peralatan; (2) Pembangkitan dan akses energi; (3) Hutan dan penggunaan lahan Mitigasi, kategori ESS: B dan C; Intermediasi 2, Skala kecil Entitas Terakreditasi: International Union for Conservation of Nature (IUCN), Entitas Pelaksana: • R20 Regions of Climate Action (R20), asosiasi Swiss yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss • Gold Standard Foundation (GS), asosiasi nirlaba yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss • International Union for Conservation of Nature (IUCN), organisasi internasional yang terdaftar di Swiss Persetujuan: 13 November 2020, di BM27 Perkiraan masa berlaku: 10 tahun Informasi proyek: https://www.greenclimate.fund/project/fp151
Pembiayaan	Sektor swasta Total nilai proyek: USD 28 juta Pembiayaan GCF: USD 18,5 juta Pembiayaan bersama: USD 1,4 juta dalam bentuk barang; hibah USD 8,1 juta Pencairan GCF: 56%
Fitur utama Rencana Proyek di Indonesia	Tidak ada informasi tentang fitur proyek secara spesifik di Indonesia.

Pandangan CSOs terhadap proposal proyek	• Tidak mendukung persetujuan proposal ini karena ada masalah nyata dengan kurangnya pendanaan untuk proyek di tingkat subnasional. Proposal yang saling terkait dari FP 151 dan FP 152 ini tidak hanya akan mengekspos GCF terhadap risiko yang signifikan tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan yang berkepanjangan pada kerangka investasi GCF dan aturan kepemilikan negara. • Proposal tersebut kurang berwawasan dalam hal transparansi dan akuntabilitas karena tidak memuat informasi apa pun tentang subproyek yang sebenarnya, keseimbangan yang diantisipasi antara berbagai sektor, dan distribusi geografis subproyek yang diharapkan. Dampak dari proyek- proyek tersebut masih belum diketahui. • Kekhawatiran lebih lanjut terkait dengan kepemilikan negara karena proposal tersebut masih perlu mengidentifikasi semua negara peserta yang sebenarnya, dan Surat Tidak Keberatan yang dikeluarkan sebagian besar gagal mengidentifikasi mengapa proyek tersebut penting bagi negara yang bersangkutan. Komentar BM27 CSO di https://docs.google.com/document/d/143EugiB7x8rr6bJErLDz8Xyl53RxAaPJexlKf-xCick/edit#heading=h.av17g7sr7zs5
---	---

Rencana Aksi Gender (RAG)	Subnational Climate Fund (SnCF) akan mengkatalisasi solusi mitigasi dan adaptasi iklim dengan berinvestasi pada 30-50 proyek subnasional di 20-25 negara melalui model pendanaan campuran untuk mewujudkan dampak iklim dan SDG yang tersertifikasi, termasuk Solusi Berbasis Alam sambil mempertahankan kerangka kerja responsif gender di seluruh desain, implementasi, pemantauan, dan evaluasi proyek. Model dana tersebut akan mengarah pada: • Peningkatan akses terhadap energi bersih dan pemberdayaan masyarakat lokal, termasuk perempuan, anak perempuan, dan kelompok rentan, melalui energi terbarukan, layanan energi, peningkatan efisiensi energi, dan teknologi baru; • Peningkatan hasil kesehatan dan peningkatan penghematan waktu, rekreasi, dan kegiatan ekonomi bagi perempuan dan anak perempuan melalui peningkatan air dan sanitasi, akses terhadap teknologi energi terbarukan dan efisien, dan optimalisasi limbah; • Peningkatan penghidupan dan ketahanan komunitas yang rentan, termasuk perempuan dan anak perempuan, terhadap dampak iklim yang tidak bersahabat melalui solusi pembangunan perkotaan yang partisipatif dan inklusif serta solusi pertanian/akuakultur (Solusi Berbasis Alam) yang restoratif dan responsif gender. Laporan RAG secara umum tertanggal 19 November 2022: https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/fp152-gender-action-plan.pdf Status Implementasi RAG • Tidak ada informasi status pelaksanaan proyek di Indonesia maupun penerapan GAP dalam Laporan Kinerja Tahunan 2022 untuk FP151:Global Subnational Climate Fund (SnCF Global) – Technical Assistance (TA) Facility tertanggal 16 Agustus 2023 • Tidak ada informasi mengenai implementasi GAP di Indonesia di website SnCF Pandangan CSOs mengenai RAG Kerangka kerja “sensitivitas gender” Standar Emas yang diusulkan tidak cukup untuk mematuhi Kebijakan Gender GCF. Organisasi masyarakat sipil menyambut baik komitmen pemrakarsa proyek untuk mematuhi “kerangka responsif gender” yang lebih ketat dalam Standar Emas untuk semua sub-proyek. Pandangan CSO tentang RAG tersebut di https://docs.google.com/document/d/143EugiB7x8rr6bJErLDz8Xyl53RxApJexlKf-xCick/edit#heading=h.av17g7sr7zs5
---	---

Status Implementasi	Menurut situs web SnCF, program di Indonesia ditujukan untuk sektor Akuakultur Berkelanjutan, dengan Kalimantan sebagai wilayah sasaran. SnCF akan memberikan bantuan teknis untuk proyek bersama perusahaan yang berbasis di Indonesia yang memfasilitasi investasi dalam akuakultur berkelanjutan melalui pengaturan utang dan ekuitas. Investasi perusahaan tersebut sangat mementingkan: • Perbaikan dan modernisasi tambak untuk meminimalkan dampak lingkungan. • Perlindungan dan pemulihan habitat bakau – proyek saat ini bertujuan untuk menyerap 600 kt karbon pada tahun 2050. • Pengaturan keuangan untuk petani lokal. Secara khusus, SCF membantu Asian Aquaculture Facility (AAF), fasilitas keuangan campuran berskala besar yang menyediakan keuangan berbasis pendapatan untuk mengkatalisasi pembangunan berkelanjutan Akuakultur. Untuk proyek ini, fasilitas tersebut akan membantu mengganti 26 hektar tambak bandeng dengan tambak udang modern dan hutan bakau di Kalimantan untuk mempromosikan lingkungan akuakultur yang lebih berkelanjutan dan efisien. AAF berharap dapat memanfaatkan masa depan pasar akuakultur yang menjanjikan, karena pertumbuhan permintaan produk akuakultur diperkirakan lebih dari 4% per tahun, dua kali lipat dari laju pertumbuhan protein hewani lainnya. SCF telah mendukung proyek tersebut melalui studi dasar pra-kelayakan, dengan tujuan untuk menentukan konsentrasi karbon tanah dasar di area lokasi; dan menyelesaikan penilaian mangrove termasuk kondisi hidrologis, kesehatan biomassa, kepadatan, keanekaragaman, dan interaksi masyarakat setempat. https://www.subnational.finance/projet/indonesia-aquaculture/ Pada tahun 2022, Proyek berhasil mengamankan hingga USD 5 juta dari Fasilitas Pembiayaan Bentang Alam Tropis (TLFF) yang dikelola oleh UNEP untuk proyek-proyek di Indonesia. Tambahan USD 135.000 dalam pendanaan bersama telah dikumpulkan di tingkat nasional. Ini melampaui target pendanaan bersama tahun 2 sebesar USD 3 juta. Laporan Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2022, 16 Agustus '2023 https://www.greenclimate.fund/document/2022-annual-performance-report-fp151global-subnational-climate-fund-sncf-global-technical
Tantangan dalam Pemantauan	Informasi yang tersedia untuk umum di situs web terkait adalah sebagai berikut: • Informasi di situs web GCF: informasi umum dan tidak ada informasi spesifik mengenai status implementasi di Indonesia sebagai negara penerima; • Situs web SnCF: tidak ada informasi lebih lanjut mengenai apakah program yang direncanakan untuk Indonesia saat ini sedang diimplementasikan, tidak ada informasi mengenai lokasi proyek di Kalimantan • Di situs web IUCN, tidak ada informasi spesifik terkait proyek SnCF Global maupun mengenai proyek yang diinisiasi di Indonesia, di: https://www.iucn.org/our-work/gef-and-gcf-implementation/iucn-and-green-climate-fund • Situs web NDA Indonesia mencantumkan dokumen terkait proposal proyek, tidak ada informasi mengenai implementasi proyek, di https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/proyek

Project Profile -5



Meskipun beberapa Anggota Dewan GCF menyampaikan kekhawatiran terhadap proposal ini, BM 27 tetap menyetujui proposal sektor swasta Global Subnational Climate Fund (SnCF Global) – Equity oleh Pegasus Capital Advisors (PCA) untuk 42 negara, termasuk Indonesia, dengan USD 150 juta dari total nilai proyek sebesar USD 750 juta pada 13 November 2020. IUCN adalah Entitas Pelaksana proyek ini.

Pendanaan Iklim Subnasional merupakan dana payung untuk penyebaran proyek- proyek berdampak sosial dan lingkungan yang tinggi di tingkat sub-nasional seperti air dan sanitasi, optimalisasi limbah, energi terbarukan yang terdesentralisasi, efisiensi energi, pertanian berbasis alam, dan kota pintar (e-mobilitas). Dana tersebut akan melakukan investasi ekuitas ke dalam wahana tujuan khusus yang memiliki minat dalam proyek-proyek di tingkat sub-nasional, di mana Dana tersebut meyakini terdapat kesenjangan investasi yang signifikan, dan oleh karena itu merupakan peluang untuk mewujudkan dampak dan keuntungan ekonomi. Secara khusus, SCF akan membantu Fasilitas Akuakultur Asia (AAF), fasilitas keuangan campuran berskala besar yang menyediakan keuangan berbasis pendapatan untuk mengkatalisasi pembangunan akuakultur yang berkelanjutan.

Hasil utama dan langsung dari program ini adalah untuk mengumpulkan dana, SnCF, guna memungkinkan implementasi dan pembiayaan 30 hingga 45 proyek infrastruktur rendah karbon dan tangguh.

Negara: 42 negara

- Afrika: Burkina Faso; Kamerun; Pantai Gading; Republik Demokratik Kongo; Gabon; Guinea; Kenya; Mali, Mozambik; Nigeria; Rwanda; Senegal; Afrika Selatan; Togo; Uganda.
- Asia-Pasifik: Kamboja; Fiji; Indonesia; Myanmar.
- Amerika Latin dan Karibia: Bahama; Brasil; Chili; Kosta Rika; Dominika; Republik Dominika; Ekuador; El Salvador; Guatemala; Haiti; Honduras, Jamaika; Meksiko; Panama; Uruguay.
- Mediterania: Albania; Yordania; Lebanon, Mauritania; Montenegro; Maroko; Makedonia Utara; Tunisia.

Area hasil: (1) Bangunan, kota, industri, dan peralatan; (2) Pembangkitan dan akses energi; (3) Hutan dan penggunaan lahan
Mitigasi; Kategori ESS: B dan C; Intermediasi 2; Skala besar

Entitas Terakreditasi: Pegasus Capital Advisor Entitas pelaksana:

- Pegasus Capital Advisors, L.P. (Pegasus), sebuah kemitraan terbatas Delaware dan Entitas Terakreditasi oleh GCF.
- SnCF Global, belum terbentuk tetapi diharapkan menjadi SICAR RAIF yang terdaftar di Luksemburg dengan AIFM yang ditunjuk.
- R20 Regions of Climate Action (R20) asosiasi Swiss yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss
- Gold Standard Foundation (GS) asosiasi nirlaba yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss
- Entitas Pelaksana: International Union for Conservation of the Nature (IUCN)

Persetujuan: 13 November 2020

Perkiraan masa berlaku: 20 tahun

Informasi proyek: <https://www.greenclimate.fund/project/fp152>

Pembiayaan	Sektor swasta Total nilai proyek: USD 750 juta • Pembiayaan GCF: ekuitas USD 150 juta • Pembiayaan bersama: ekuitas USD 600 juta
Fitur Utama Rencana Proyek di Indonesia	Tidak ada informasi tentang fitur proyek yang spesifik untuk Indonesia
Pandangan CSOs terhadap proposal proyek	• Tidak mendukung persetujuan proposal ini karena ada masalah nyata dengan kurangnya pendanaan untuk proyek di tingkat subnasional. Proposal FP 151 dan FP 152 yang saling terkait ini tidak hanya akan mengekspos GCF terhadap risiko yang signifikan tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan yang berkepanjangan pada kerangka investasi GCF dan aturan kepemilikan negara. • Proposal tersebut kurang berwawasan dalam hal transparansi dan akuntabilitas karena tidak memuat informasi apa pun tentang subproyek yang sebenarnya, keseimbangan yang diantisipasi antara berbagai sektor, dan distribusi geografis subproyek yang diharapkan. Dampak dari proyek tersebut masih belum diketahui. • Kekhawatiran lebih lanjut terkait dengan kepemilikan negara karena proposal tersebut masih perlu mengidentifikasi semua negara peserta yang sebenarnya, dan Surat Tidak Keberatan yang dikeluarkan sebagian besar gagal mengidentifikasi mengapa proyek tersebut penting bagi negara yang bersangkutan. Komentar B27 CSO di https://docs.google.com/document/d/143EugiB7x8rr6bJErLDz8Xyl53RxAaPJexlKf-xCick/edit#heading=h.av17g7sr7zs5

Rencana Aksi Gender (RAG)	Pendanaan Kklim Subnasional (SnCF) akan mengkatalisasi solusi mitigasi dan adaptasi iklim dengan berinvestasi pada 30-50 proyek subnasional di 20-25 negara melalui model keuangan campuran untuk memberikan dampak iklim dan SDG yang tersertifikasi, termasuk Solusi Berbasis Alam sambil mempertahankan kerangka kerja yang responsif gender di seluruh desain, implementasi, pemantauan, dan evaluasi proyek. Model dana tersebut akan mengarah pada: • Peningkatan akses ke energi bersih dan pemberdayaan masyarakat lokal, termasuk perempuan, anak perempuan, dan populasi rentan, melalui energi terbarukan, layanan energi, peningkatan efisiensi energi, dan teknologi baru; • Peningkatan hasil kesehatan dan peningkatan penghematan waktu, rekreasi, dan kegiatan ekonomi bagi perempuan dan anak perempuan melalui peningkatan air dan sanitasi, akses ke teknologi energi terbarukan dan efisien, dan optimalisasi limbah; • Peningkatan mata pencaharian dan ketahanan masyarakat rentan, termasuk perempuan dan anak perempuan, terhadap dampak iklim yang tidak bersahabat melalui solusi pembangunan perkotaan yang partisipatif dan inklusif serta solusi pertanian/akuakultur restoratif yang responsif gender (Solusi Berbasis Alam). Rencana aksi gender untuk FP15 Dana Iklim Subnasional Global (SnCF Global) - Ekuitas tertanggal 19 November 2020 di: https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/fp152-gender-action-plan.pdf Status Implementasi RAG • Tidak ada informasi status implementasi proyek di Indonesia maupun implementasi GAP dalam Laporan Kinerja Tahunan 2021 untuk FP152 Pendanaan Iklim Subnasional Global (SnCF Global) – Ekuitas tertanggal 15 Maret 2023 di: https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/fp152-annual-performance-report-cy2021-v.pdf • Tidak ada informasi implementasi GAP di Indonesia di situs web SnCF Pandangan CSO terhadap RAG Kerangka kerja “sensitivitas gender” Standar Emas yang diusulkan tidak cukup untuk mematuhi Kebijakan Gender GCF. CSO menyambut baik komitmen pengusul proyek untuk mematuhi “kerangka kerja responsif gender” yang lebih ketat dari Standar Emas untuk semua subproyek. Komentar B27 CSO di https://docs.google.com/document/d/143EugiB7x8rr6bJErLDz8Xyl53RxAaPJexlKf-xCick/edit#heading=h.av17g7sr7zs5
Status of Implementation	SCF tengah mempertimbangkan untuk berinvestasi di Shire Oak, sebuah platform untuk pengadaan, pengembangan, dan pengoperasian aset energi terbarukan. Dalam konteks investasi SCF, proyek tersebut akan difokuskan terutama pada Indonesia dan Afrika Selatan. Di Indonesia, platform tersebut mengembangkan aset surya komersial dan industri (C&I) di atap, penggantian genset diesel di pulau terpencil, dan pemasangan surya di tanah untuk pengguna industri. SCF bermaksud untuk menyuntikkan modalnya secara langsung ke platform tersebut untuk mendukung pengembangan dan pembangunan proyek jaringan pipa pertama yang sedang berlangsung di Indonesia. Sebagian kecil modal SCF akan digunakan untuk mendukung platform tersebut secara lebih umum. https://www.subnational.finance/projet/indonesia-shire-oak/

Tantangan dalam Pemantauan	Kurangnya informasi tentang status pelaksanaan proyek. Informasi yang tersedia untuk publik di situs web terkait adalah sebagai berikut: • Di situs web GCF: tidak ada informasi tentang pelaksanaan proyek dalam Laporan Kinerja Tahunan 2021 untuk FP152: Dana Iklim Subnasional Global (SnCF Global) – Ekuitas, tertanggal 25 Maret 2023, juga tidak ada dalam laporan Pengamanan lingkungan dan sosial (ESS) terbaru untuk FP152 tertanggal 27 Juni 2023. • Di situs web SnCF: tidak ada informasi lebih lanjut tentang apakah program yang direncanakan untuk Indonesia sekarang sedang dilaksanakan atau tentang lokasinya. • Di situs web NDA Indonesia: tidak ada informasi tentang pelaksanaan proyek
--	---

Profil Proyek -6 	ASEAN Infrastructure Fund (AIF) pada bulan April 2019 meluncurkan ASEAN Catalytic Green Facility (ACGF) untuk mempercepat investasi infrastruktur hijau di Asia Tenggara dengan menyediakan pinjaman. Program AGCF untuk Pemulihan Hijau membantu meningkatkan investasi iklim sebagai bagian dari respons stimulus ekonomi pasca COVID-19, dan menciptakan platform untuk perubahan paradigma yang signifikan di Asia Tenggara. Program ini akan mendukung setidaknya 23 subproyek berdampak tinggi dan rendah emisi di kawasan ASEAN dalam energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan alam antara tahun 2021 dan 2050. Selain itu, ACGF menyediakan bantuan teknis dan akses pinjaman dari mitra pembiayaan bersama kepada pemerintah ASEAN untuk mengidentifikasi dan menyiapkan proyek infrastruktur hijau yang layak secara komersial. Negara: Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Filipina Area hasil: Akses energi dan pembangkitan listrik; Transportasi rendah emisi; Bangunan, kota, industri, dan peralatan; Kehutanan dan penggunaan lahan Mitigasi; Kategori ESS: Intermediasi 1; Skala besar Entitas Terakreditasi: Bank Pembangunan Asia Entitas Pelaksana: Bank Pembangunan Asia Persetujuan: 19 Maret 2021 di BM 28 Perkiraan masa berlaku: 30 tahun Informasi proyek: https://www.greenclimate.fund/project/fp156
Pembiayaan	Sektor publik Total nilai proyek: USD 3,7 miliar Pembiayaan GCF: hibah USD 20 juta, pinjaman USD 280 juta Pembiayaan bersama: pinjaman USD 3,385 juta Penyaluran Pembiayaan GCF: 24%
Fitur Utama Rencana Proyek untuk Indonesia	Proyek potensial: Fasilitas Keuangan Hijau SDG Indonesia One (Total biaya proyek: 150 juta USD) Proyek ini akan membiayai serangkaian proyek mitigasi perubahan iklim skala kecil di tingkat subnasional dan perkotaan yang telah diidentifikasi sebelumnya, termasuk mikrohidro, pembangkit listrik tenaga sampah, dan kendaraan listrik, yang memobilisasi modal swasta yang signifikan. Fasilitas ini berfokus pada subproyek yang siap dilaksanakan yang akan memungkinkan pencairan dana yang cepat dan efektif kepada penerima manfaat akhir. Sebagai bagian dari platform unggulan SDG Indonesia One di Indonesia, proyek ini akan mendukung PT SMI dalam meningkatkan operasi keuangan hijau dan berkontribusi secara signifikan terhadap target mitigasi Indonesia. https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/funding-proposal-fp156.pdf

Pandangan CSO mengenai proposal proyek	• Proyek tersebut akan membiayai proyek-proyek mendatang yang tidak ditentukan dalam proposal pendanaan, sehingga memungkinkan Kategori A (proyek berisiko tinggi) yang tidak akan pernah tunduk pada standar GCF. • ADB memiliki sejarah pembiayaan proyek energi kotor. Oleh karena itu, CSO mendesak GCF untuk memberikan syarat yang melarang ADB memasukkan Waste-to-Energy, teknologi pengurangan emisi yang belum terbukti, dan energi panas bumi, karena berisiko tinggi dan masih menghasilkan emisi GRK yang signifikan. Menyetujui penggunaan teknologi tersebut akan bertentangan dengan tujuan GCF. Intervensi Pengamat Aktif CSO GCF BM28 hari ke-4, di: https://docs.google.com/document/d/1lmm7-MZCae7IB9Owuh0NXIAorY3ggBzW/edit
--	--

Rencana Aksi Gender (RAG)	GAP untuk Fasilitas Keuangan Hijau Katalitik ASEAN: Pemulihan Hijau terdiri dari dua komponen utama: (1) Dana pengurangan risiko untuk proyek rendah emisi dan (2) Dukungan kebijakan, pengetahuan, dan pengembangan kapasitas Berdasarkan (1) Pinjaman Program (ACGF GRP) untuk proyek rendah emisi: • Semua subproyek ACGF GRP menyiapkan dan melaksanakan rencana aksi kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESIAP) yang diinformasikan oleh asesmen agender dan sosial; • Subproyek ACGF GRP mencakup pekerjaan hijau untuk perempuan dan kelompok rentan, menerapkan standar ketenagakerjaan inti termasuk kesetaraan upah dan kondisi kerja yang fleksibel, serta tempat kerja yang ramah perempuan dan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai untuk jenis kelamin; • Partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam kegiatan pelatihan teknis dan kejuruan teknologi hijau dan sertifikasi; • Dukungan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan dalam subproyek ACGF GRP melalui (jika berlaku) pelatihan keterampilan bisnis dan akses ke program inklusi keuangan; • Program yang dilaksanakan melalui lembaga keuangan memberikan manfaat nyata bagi perempuan dan kelompok rentan melalui peningkatan akses mereka terhadap pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan dan peran kepemimpinan. (Di bawah 2) Dukungan kebijakan, pengetahuan, dan pengembangan kapasitas: Kegiatan pengembangan kebijakan, pengetahuan, dan kapasitas yang didanai hibah ACGF memajukan kesetaraan gender dan inklusi sosial Rencana aksi gender untuk FP156: Fasilitas Keuangan Hijau Katalitik ASEAN (ACGF): Program Pemulihan Hijau tertanggal 24 Maret 2021 di https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/fp156-gender-action-plan.pdf Status implementasi RAG: Tidak ada informasi tentang status implementasi GAP di Indonesia di situs web GCF, ACGF, NDA, dan SMI. ADB telah memasukkan rencana aksi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) ke dalam Fasilitas Keuangan Hijau Indonesia Bersatu (SIO-GFF) yang mencakup: 1. dukungan bagi PT SMI untuk mengimplementasikan kebijakan GESI-nya; 2. pelembagaan GESI, yang dipimpin oleh kelompok kerja yang mencakup minimal 40% perempuan, dan 3. pengembangan staf di PT SMI (minimal 40% perempuan) yang terlatih dalam kerangka kerja hijau, pembiayaan, serta perencanaan dan pemantauan SDG. ADB, Report and Recommendation of the President to the Board of Directors, January 2022 at: https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/54152/54152-001-rrp-en.pdf
---	---

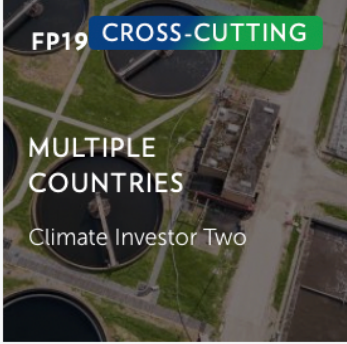
	CSO intervention on GAP Perjanjian dan representasi yang kuat mengenai gender dan Masyarakat Adat, serta upaya perlindungan dengan menggunakan Kebijakan Masyarakat Adat dan Gender GCF, harus menjadi standar minimum untuk subproyek di FAA antara GCF dan ADB. https://docs.google.com/document/d/1lmm7-MZCae7IB9Owuh0NXIAorY3gqBzW/edit
Status of Implementation	Pada tahun 2018, AIF menciptakan ACGF, yang disetujui pada tahun 2023 sebagai dana hijau dengan dampak hijau, bankabilitas, dan mobilisasi sektor swasta. ACGF memiliki dua jendela keuangan: (1) Inisiatif Keuangan Hijau dan Inovatif dan Keuangan Hijau. Dengan persetujuan dari ADB pada bulan Desember 2021, ACGF mendirikan (2) Pusat Keuangan Biru yang menerbitkan Obligasi Sukuk Biru pada tahun 2023, di antara hal-hal lainnya. Pada tahun 2022, ADB menyetujui 3 proyek yang memenuhi syarat ACGF dalam alur AIF untuk Indonesia: Program Energi Berkelanjutan dan Inklusif (Subprogram 3) dan pada bulan Desember 2023 dua proyek bantuan teknis, yaitu, SDG One–Fasilitas Keuangan Hijau, Indonesia. Selain itu, ACGF menyetujui x6 proyek bantuan teknis untuk Indonesia di bawah Pusat Keuangan Blue SEA. Selain itu, pusat keuangan ini menciptakan Akselerator Keuangan Biru, yang menyediakan pengembangan kapasitas untuk perusahaan rintisan dan keuangan untuk UKM. Pada tahun 2023, UNDP, sebagai akselerator, bersama dengan Kementerian Kelautan Indonesia, menyelenggarakan program pelatihan yang ekstensif. Dengan pendanaan bersama dari Inggris, AGCF, dengan persetujuan ADB, membiayai Proyek Pengelolaan Sumber Daya Banjir di Jawa Barat dan Jawa Tengah. AGCF juga membangun kapasitas untuk Program Twinning bekerja sama dengan Institut Maritim Korea, Pemerintah Indonesia, operator perikanan, dan EAKPF. Program ini berlangsung hingga tahun 2024. Selain itu, ACGF akan membiayai proyek transportasi hijau perkotaan, dan ACGF akan berkolaborasi dengan ADB, AFD, dan KfW untuk mendukung transisi Indonesia menuju energi bersih, yang tengah diperluas di bawah Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP), yang kini juga melibatkan Uni Eropa (UE) dan Inggris, untuk ikut membiayai fase pertama program transisi energi bersih. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/950121/asean-catalytic-green-finance-facility-2023.pdf SMI menjalankan SDG One–Green Finance Facility, Indonesia yang merupakan salah satu dari empat produk SDG Indonesia One yang dibentuk pada tahun 2018 oleh Kementerian Keuangan. Dana campuran dari berbagai sumber ini diharapkan dapat menjadi katalisator dan meningkatkan kapasitas proses pendanaan infrastruktur di Indonesia. Hingga Desember 2022, terdapat 69 proyek pembiayaan campuran dengan komitmen USD 3,19 miliar. https://ptsmi.co.id/sdg-indonesia-one

Tantangan dalam Pemantauan	Pendanaan ACGF untuk proyek dan bantuan teknis berasal dari empat sumber utama, yaitu AIF, ADB, mitra ACGF (parallel co-financier: AFD, CDP, ECDF, EIB dan KfW) dan mitra ACGF (GCF, Inggris dan Uni Eropa) yang dananya dikelola oleh ADB. Bagaimana akuntabilitas proyek dan bantuan teknis kepada GCF? ACGF dan subproyeknya memiliki situs web sendiri. Mereka membuat pengumuman sendiri di sana tetapi tidak selalu di situs web ADB maupun situs GCF. Selain itu, berbagai dana tercantum di berbagai subsitus. Kurangnya informasi tentang status pelaksanaan proyek. Informasi yang tersedia untuk umum di situs web terkait adalah sebagai berikut: Dokumen yang tercantum di situs web GCF adalah dokumen yang terkait dengan proposal proyek subproyek ACGF GRP, tidak ada pembaruan tentang implementasi proyek dan subproyek ACGF GRP misalnya yang disetujui oleh ADB pada subproyek SDG One–Fasilitas Keuangan Hijau, Indonesia maupun Proyek Pengelolaan Sumber Daya Banjir di Jawa Barat yang memiliki Kategori A untuk Pemukiman Kembali Tidak Sukarela. Tidak ada pula laporan kinerja tahunan Di situs web NDA Indonesia - dokumen serupa yang ditetapkan di situs web GCF, juga tidak ada informasi tentang implementasi proyek dan subproyek. Informasi umum tentang SDG Indonesia One di situs web SMI. Tidak ada informasi lebih lanjut tentang proyek keuangan campuran mereka. ADB menyatakan bahwa proposal pendanaan, termasuk lampirannya, tidak boleh diungkapkan secara lengkap oleh GCF dan karenanya memberikan kepada Sekretariat GCF/dua salinan proposal pendanaan, termasuk semua lampiran, satu salinan lengkap untuk penggunaan internal GCF yang bagian-bagian rahasianya ditandai sebagaimana mestinya dan catatan penjelasan mengenai bagian-bagian tersebut dan alasan terkait kerahasiaan berdasarkan kebijakan pengungkapan entitas terakreditasi, satu salinan yang telah disunting untuk diungkapkan di situs web GCF. https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/funding-proposal-fp156.pdf
--	---

Profil Proyek -7 	Pegasus Capital Advisors membuat dan mengusulkan Jendela Investasi Dana Global untuk Terumbu Karang (GFCR), dana ekuitas swasta untuk berinvestasi dalam ekonomi biru dengan melindungi terumbu karang. Dana ini bertujuan untuk mengatasi hambatan pendanaan dan investasi swasta di bidang-bidang berikut: produksi laut berkelanjutan, ekowisata, dan infrastruktur berkelanjutan serta pemrosesan limbah. Negara: 17 negara • Afrika: Komoro, Kenya, Madagaskar, Mozambik, Seychelles, dan Tanzania; • Asia-Pasifik: Kamboja, Fiji, Indonesia, Malaysia, Maladewa, Filipina, Kepulauan Solomon, Sri Lanka, Timor Leste, dan Vietnam; • Amerika Latin dan Karibia: Bahama, Belize, Brasil, Kolombia, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador, Guatemala, Honduras, Jamaika, Meksiko Wilayah hasil: (1) Orang, komunitas, dan wilayah yang paling rentan; (2) Kesehatan dan kesejahteraan, ketahanan pangan dan air; (3) Infrastruktur dan lingkungan binaan; (4) Ekosistem dan layanan ekosistem Adaptasi; Kategori ESS: Intermediasi 2; Skala besar Entitas Terakreditasi: Pegasus Capital Advisors Entitas Pelaksana: 1. Pegasus Capital Advisors, L.P. ("Pegasus") 2. GFCR Fund – wahana investasi gabungan yang akan dibentuk oleh Entitas Terakreditasi 3. General Partner – entitas yang akan dibentuk oleh Entitas Terakreditasi 4. Manager – entitas yang akan dibentuk oleh Entitas Terakreditasi 5. GCF Reef Holdings" – entitas yang akan dibentuk oleh Entitas Terakreditasi 6. Holdings GP" – entitas yang akan dibentuk oleh Entitas Terakreditasi, Persetujuan: 7 Oktober 2021 di BM30 Perkiraan masa berlaku: 20 tahun Informasi proyek di https://www.greenclimate.fund/project/fp180
Financing	Sektor Swasta Total nilai proyek: USD 500 juta Pembiayaan GCF: ekuitas USD 125 juta Pembiayaan bersama: ekuitas USD 375 juta Pencairan dana GCF: 40%
Fitur Utama Rencana Proyek untuk Indonesia	Proposal pendanaan tidak memberikan informasi apa pun tentang rencana khusus untuk Indonesia, tetapi di bagian selanjutnya di situs web GFCR terdapat informasi tentang proyek-proyek yang telah disetujui dan yang sedang dikembangkan di Indonesia.

Pandangan CSOs mengenai proposal proyek	CSO tidak mendukung persetujuan proposal karena: • Ada kesenjangan antara beberapa kegiatan potensial yang didanai dalam program ini dan perlindungan terumbu karang. Alih-alih membantu masyarakat di ekosistem terumbu karang beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, proyek adaptasi ini justru akan mendapat keuntungan dari kerusakan terumbu karang. • Tidak memiliki kriteria yang memadai untuk memastikan manfaat langsung dari pendanaan untuk perlindungan dan pemulihan terumbu karang atau alasan iklim yang masuk akal. Proposal tersebut tidak membuat hubungan yang kredibel antara pendanaan untuk kegiatan wisata dan resor dengan perlindungan ekosistem terumbu karang. Sebaliknya, investasi tersebut akan membantu bisnis seperti biasa tumbuh sementara praktik yang merusak karang terus berlanjut secara paralel. Oleh karena itu, sarannya adalah untuk mempersempit cakupan program dengan mengecualikan resor hotel, kapal pesiar, dan budidaya udang. • Proposal pendanaan ini tampaknya didorong oleh Entitas Terakreditasi, dengan proposal yang telah disiapkan sebelumnya yang dikirim ke berbagai negara dengan harapan mereka menyerahkan Surat Tidak Keberatan tanpa memberi mereka kesempatan yang memadai untuk memberikan masukan lokal dan nasional. Masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan investasi ini terhadap negara-negara yang terlibat dan masyarakat yang terdampak akan menjadi masalah potensial dari proyek ini. Jaringan CSO Pemantau GCF pada GCF B30 4-7 Oktober 2021 di https://docs.google.com/document/d/1HLSr6tOZRvTnUkTCWGDoxElf1wIXRHk8UQ0pCe-UwE8/edit
Rencana Aksi Gender (RAG)	• Desain program dan proyek yang responsif gender meningkatkan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan untuk mendorong kemandirian dan memungkinkan mereka menjadi agen perubahan. • Desain program yang responsif gender meningkatkan hasil kesehatan dan meningkatkan keselamatan fisik dan emosional perempuan dan anak perempuan • Desain program dan proyek yang responsif gender untuk meningkatkan mata pencaharian berkelanjutan bagi perempuan dan anak perempuan • Menetapkan proses dan hasil kesetaraan gender tingkat dana GFCR • Melaksanakan penilaian dan rencana aksi gender tingkat proyek • Pengamanan yang sensitif gender dan konsultasi pemangku kepentingan dilaksanakan, yang mengarah pada proyek yang responsif gender • Desain dan pengembangan https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/fp180-gender-action-plan.pdf dated 3 October 2021 Status implementasi RAG idak ada dokumen yang tercantum atau laporan mengenai implementasi GAP di situs web GCF

Status Implementasi	Pada tahun 2022, GFCR menyetujui delapan program melalui lebih dari 30 kemitraan pelaksana dengan entitas sektor swasta dan nirlaba serta mitra strategis dan investasi tambahan. Salah satu kemitraan ini adalah dengan Yayasan Cakrawala Indonesia (Conservation International versi Indonesia). Selain itu, sepuluh program sedang dikembangkan, antara lain, dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (Nature Conservancy versi Indonesia). Yayasan Konservasi Indonesia menciptakan program Terumbu Karang Sehat Indonesia untuk mengatasi penyebab degradasi lokal yang berfokus pada dua lokasi terumbu karang penting: Bentang Laut Kepala Burung (BHS) di Irian dan Pulau Sumba. Program BHS bertujuan untuk mendiversifikasi aliran pendapatan berkelanjutan bagi jaringan KKL dan mempromosikan pariwisata bahari yang bertanggung jawab untuk mengurangi ancaman terhadap terumbu karang dan memberi manfaat bagi masyarakat setempat. Di Pulau Sumba, program ini berupaya mengubah industri budidaya rumput laut yang berkembang pesat menjadi model yang menguntungkan dan positif bagi terumbu karang, sejalan dengan tujuan konservasi dan ekonomi biru berkelanjutan Pemerintah Indonesia. Global Funds for Coral Reefs Action Report 2022 di: https://globalfundcoralreefs.org/wp-content/uploads/2023/07/GFCR-Annual-Report-2022.pdf
Tantangan dalam pemantauan	Kurangnya informasi tentang status pelaksanaan proyek. Informasi yang tersedia untuk umum di situs web terkait adalah sebagai berikut: • Di situs web GCF: dokumen yang tercantum terkait dengan proposal proyek, tidak ada informasi tentang pelaksanaan proyek. • Di situs web GFCR: informasi umum tentang proyek dan keuangannya, tetapi tidak ada informasi yang tersedia tentang pelaksanaan semua kerangka kerja yang dikembangkan untuk perlindungan, pemantauan, dll. serta tentang deskripsi terperinci GAP • Dokumen yang tercantum di situs web NDA Indonesia sama dengan di situs web GCF. Tidak ada informasi tentang pelaksanaan proyek • Di situs web Yayasan Cakrawala Indonesia dan Yayasan Konservasi Indonesia, keduanya mitra GFCR di Indonesia, tidak ada informasi tentang program atau proyek yang didanai oleh GFCR. • Pegasus menyatakan bahwa proposal pendanaan, termasuk lampirannya, tidak boleh diungkapkan secara lengkap oleh GCF dan karenanya memberikan kepada Sekretariat GCF/dua salinan proposal pendanaan, termasuk semua lampiran, salinan lengkap untuk penggunaan internal GCF di mana bagian rahasia ditandai sebagaimana mestinya dan catatan penjelasan mengenai bagian tersebut dan alasan terkait kerahasiaan berdasarkan kebijakan pengungkapan entitas terakreditasi, dan salinan yang telah disunting untuk diungkapkan di situs web GCF di https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/funding-proposal-fp180.pdf

Profil Proyek -8 	GCF menyetujui Climate Investor Two (CI2) sebagai program sektor swasta berskala pertama di sektor air untuk mendukung sektor swasta dalam mengembangkan dan membangun proyek infrastruktur yang tahan iklim di negara- negara berkembang di sektor air, sanitasi, dan kelautan/ maritim. Negara - 19: Bangladesh, Botswana, Brasil, Kolombia, Pantai Gading, Djibouti, Ekuador, India, india, Kenya, Madagaskar, Maladewa, Maroko, Namibia, Nigeria, Filipina, Sierra Leone, Afrika Selatan, dan Uganda Area hasil: • Mitigasi: (1) Pembangkitan dan akses energi; (2) Bangunan, kota, industri, dan peralatan; (3) Kehutanan dan penggunaan lahan. • Adaptasi: (1) kesehatan dan kesejahteraan, serta ketahanan pangan dan air; (2) Infrastruktur dan lingkungan binaan; (3) Ekosistem dan layanan ekosistem Kategori ESS lintas sektoral: Intermediasi 1; Skala besar Entitas Terakreditasi: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) Entitas pelaksana: 1. Climate Fund Managers (CFM) 2. Development Fund 3. Construction Equity Fund 4. FMO Persetujuan: 20 Juli 2022 di BM 10 Perkiraan masa berlaku: 20 tahun https://www.greenclimate.fund/project/fp190
Pembiayaan	Sektor swasta Nilai total proyek: USD 500 juta • Pembiayaan GCF: hibah USD 145 juta • Pembiayaan bersama: hibah USD 95 juta, ekuitas USD 640 juta Pencairan dana GCF: 23%
Fitur Utama Rencana Proyek untuk Indonesia	Proposal ini tidak memberikan informasi apapun mengenai rencana spesifik untuk Indonesia.

Key CSOs interventions on project proposal	Intervensi Utama CSO pada Proposal Proyek CSO menentang persetujuan proposal ini karena program ini: • berfokus terutama pada pengembangan dan pembangunan proyek infrastruktur abu-abu besar seperti pelabuhan, utilitas air, dan infrastruktur terkait air lainnya. • tidak menunjukkan alasan iklim untuk komponen adaptasinya karena tidak memiliki konteks spesifik lokasi yang memungkinkan evaluasi eks-ante terhadap dampak perubahan iklim dan faktor eksternal lainnya di area tersebut untuk menilai apakah tanggapan yang diusulkan tepat. • berpotensi menyebabkan maladaptasi dan membuat mustahil untuk mengevaluasi kemungkinan proyek di wilayah masyarakat adat • kurangnya penilaian potensi emisi GRK dari infrastruktur pelabuhan yang direncanakan yang akan mempromosikan dan meningkatkan perdagangan dan transportasi bahan bakar fosil atau produk intensif karbon lainnya. Kurangnya daftar pengecualian dalam proposal ini membuat penilaian ini semakin sulit. Kekhawatiran lain yang terkait dengan proposal ini: • LSM, masyarakat lokal, dan kelompok masyarakat adat telah menyatakan penolakan keras terhadap privatisasi air, konsesi, dan proyek konversi limbah menjadi energi dalam daftar proyek prospektif program ini. Proyek-proyek tersebut akan memperburuk krisis iklim, kelangkaan air, dan ketimpangan ekonomi akibat privatisasi barang dan jasa publik. • Pendanaan konsesi yang langka untuk adaptasi di negara-negara berkembang digunakan untuk membiayai kegiatan sektor swasta yang akan menguntungkan investor swasta tanpa memastikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Hibah GCF harus membiayai pendekatan adaptasi yang mendukung pendekatan yang digerakkan oleh negara, berpusat pada masyarakat, dimiliki secara lokal, responsif gender, dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia. • Meskipun CFM berpengalaman dalam pengelolaan dana dan investasi ekuitas di sektor dan proyek yang berfokus pada iklim, CFM belum memiliki pengalaman investasi atau rekam jejak di sektor air dan investasi terkait laut. CSO telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran bahwa proyek semacam itu menyebabkan ketidakmampuan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, CSO, NDA, dan bahkan GCF sendiri, untuk mengevaluasi subproyek yang akan datang dengan benar dan memastikan desain proyek tidak hanya menghindari kerugian tetapi juga memastikan hasil positif, termasuk hasil adaptasi, bagi semua pemangku kepentingan dan khususnya masyarakat yang rentan. https://bit.ly/GCFB33CSolnterventions
--	--

Rencana Aksi Gender (RAG)	• Meningkatkan akses perempuan dan anak perempuan terhadap air dan sanitasi (WASH) • Suara dan peran perempuan dalam perencanaan dan operasi • Kesempatan kerja yang inklusif • Pemantauan dan pembelajaran • Isu lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang mendukung Rencana aksi gender untuk FP190: Climate Investor Two tertanggal 7 September 2022 di:https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/fp190-gap.pdf Status Implementasi RAG Tidak ada informasi mengenai status implementasi GAP di situs web GCF Pandangan CSO terhadap RAG Penilaian Gender dan Rencana Aksi Gender dalam proposal tersebut tidak memiliki unsur-unsur yang diperlukan untuk mematuhi Kebijakan Gender GCF, yang bertujuan untuk mempromosikan aksi iklim yang peka gender. Analisis gender dan keterlibatan dengan pemangku kepentingan yang relevan untuk penilaian gender dilakukan di beberapa negara tempat proyek akan dilaksanakan, meskipun terdapat perbedaan budaya dan sejarah yang jelas. Kegiatan dalam RAG terlalu samar, karena tidak memiliki informasi spesifik tentang cara mengimplementasikannya, bagaimana tindakan tersebut akan terlihat di negara-negara dengan konteks gender yang berbeda, dan tujuan kuantitatif yang diharapkan. https://bit.ly/GCFB33CSolnterventions
Status Implementasi	Belum ada proyek yang dimulai di Indonesia
Tantangan dalam pemantauan	Kurangnya informasi tentang status pelaksanaan proyek. Informasi yang tersedia untuk umum di situs web terkait adalah sebagai berikut: • Tidak ada informasi tentang pelaksanaan proyek di Indonesia di situs web GCF maupun situs web NDA Indonesia. • Tidak ada informasi tentang proyek CI2 di Indonesia di halaman web Climate Investor 2

Profil Proyek-9 	Proposal Pendanaan ‘Program Efisiensi Energi di Bangunan (PEEB) Cool’ akan mengembangkan desain, konstruksi, dan operasi bangunan yang lebih hemat energi untuk subsektor dengan potensi signifikan untuk adaptasi perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca, seperti skema perumahan baru berskala besar dan bangunan komersial. Sepanjang kegiatannya, PEEB Cool akan menggabungkan solusi pendinginan yang efisien, bahan konstruksi berkelanjutan, dan keterlibatan pemangku kepentingan konstruksi ekosistem. Negara -11: Albania, Argentina, Kosta Rika, Djibouti, Indonesia, Meksiko, Maroko, Nigeria, Makedonia Utara, Sri Lanka, dan Tunisia Area hasil: • Mitigasi: Bangunan, kota, industri, dan peralatan • Adaptasi: Infrastruktur dan lingkungan binaan Lintas sektor; Kategori ESS: B; Entitas Terakreditasi Skala Besar: Agence Française de Développement (AFD) Entitas Pelaksana: 1. Agence Française de Développement (AFD) 2. PROPARCO (société de Promotion et Participation à la Coopération économique) 3. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Persetujuan: 20 Oktober 2022 di BM34 Perkiraan Umur: 30 tahun https://www.greenclimate.fund/project/fp194
Pembiayaan	Sektor publik Nilai total proyek: USD 1,4 miliar Pembiayaan GCF: pinjaman USD 187 juta, hibah USD 47,7 juta Pembiayaan bersama: pinjaman USD 1,18 miliar, hibah USD 8,12 juta Pencairan dana GCF: 7%
Fitur Utama Rencana Proyek untuk Indonesia	Proposal pendanaan tidak memberikan informasi apa pun tentang rencana khusus untuk Indonesia.

Pandangan CSO mengenai proposal proyek	Dasar pemikiran iklim dari proposal lintas sektor ini, khususnya dasar pemikiran adaptasinya, lemah. Tidak jelas apakah subproyek yang diharapkan akan meningkatkan ketahanan di negara-negara sasaran atau apakah tindakan adaptasi potensial diperlukan. Manfaat bagi masyarakat yang terdampak iklim tidak jelas terkait klaim peningkatan produktivitas di sektor komersial dan pariwisata, yang berfokus pada pembangunan pusat perbelanjaan dan hotel. Kegagalan proposal untuk mengenali potensi dan memetakan teknologi tradisional dan lokal sebagai bagian dari desain program merupakan peluang yang hilang. Teknologi tradisional dan lokal ini lebih mungkin relevan dengan konteks lokal yang berbeda di mana program akan aktif. Mereka juga membantu memastikan sumber bahan lokal, sehingga memastikan manfaat ekonomi tambahan. Proposal tersebut tidak menyertakan informasi tentang kriteria kelayakan untuk lembaga keuangan dan pinjaman, tetapi dalam studi kelayakan, itu bukan untuk umum. Karena proposal ini merupakan proposal sektor publik, semua lampiran harus diungkapkan kepada publik, sesuai dengan praktik yang berlaku. Proposal tersebut tidak menyebutkan potensi Masyarakat Adat yang terpengaruh oleh aktivitas program, meskipun beberapa negara sasaran memiliki masyarakat adat yang signifikan yang dapat terpengaruh oleh subproyek, cara menerapkan perlindungan dan memperoleh persetujuan bebas, didahulukan, dan berdasarkan informasi dari mereka untuk aktivitas yang memengaruhi mereka. Intervenies Jaringan CSOs Pemantau GCF Rapat Dewan ke 34 di https://docs.google.com/document/d/1o2qHzHNZF1pLnx101txKXdZCIZXziZMUdlhE2_TZjhU/edit
--	--

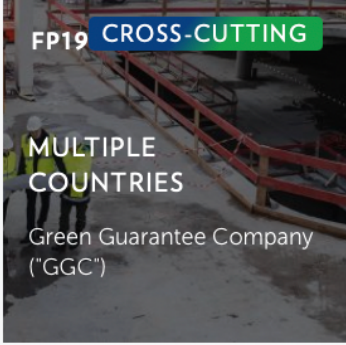
Rencana Aksi Gender	1. Pendekatan lintas sektoral untuk kesetaraan gender: • Proses penilaian subproyek yang mengintegrasikan gender – untuk membantu subproyek dalam memenuhi tujuan gender internal AFD Group dan berupaya memecahkan masalah gender yang teridentifikasi • Pengembangan kapasitas mitra subproyek (IE dan penerima manfaat akhir) pada topik terkait gender – untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah gender di tingkat negara dan subproyek. Acara akan diselenggarakan yang mencakup penerima manfaat langsung, pemangku kepentingan utama negara, dan mitra untuk berbagi praktik terbaik • Mengembangkan strategi untuk mengatasi kesenjangan dalam pertimbangan gender di sektor efisiensi bangunan untuk setiap negara guna dimasukkan ke dalam proses pengembangan kebijakan 2. Pendekatan tematik khusus: • Memberikan pelatihan teknis khusus gender untuk meningkatkan kemampuan kerja jangka panjang pekerja lokal dari semua jenis kelamin. • Akses yang setara terhadap layanan – meningkatkan akses bagi perempuan terhadap solusi dan layanan bioklimat dan bangunan hijau baru dengan merancang intervensi yang mengatasi masalah gender • Akses yang setara terhadap keuangan melalui pembentukan dana khusus RAG tertanggal 20 Oktober 2022https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gap-fp194.pdf Status implementasi RAG Tidak ada informasi mengenai status implementasi GAP di situs web GCF Pandangan CSO tentang RAG RAG dan pengarusutamaan gender dalam proposal tersebut tidak memadai karena tidak membedakan antara konteks yang berbeda dari semua negara yang terlibat. Hanya tiga langkah yang disertakan sebagai persyaratan: analisis gender dan rencana aksi, data yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, dan tinjauan kebijakan tempat kerja. Tidak ada kriteria untuk kualitas yang diharapkan dari analisis gender dan rencana aksi atau anggaran terkait. Rapat Dewan GCF ke 34 - Pandangan Jaringan CSO Pemantau GCF di https://docs.google.com/document/d/1o2qHzHNZF1pLnx101txKXdZCIZXiZMUdIhE2_TZjhU/edit
Status Implementasi	Belum ada proyek yang dimulai di Indonesia
Tantangan dalam Pemantauan	Kurangnya informasi tentang status pelaksanaan proyek. Informasi yang tersedia untuk umum di situs web terkait adalah sebagai berikut: • Situs web GCF mencantumkan dokumen yang terkait dengan proposal proyek seperti Proposal Pendanaan yang Disetujui, Penilaian Gender dan Rencana Aksi, Laporan ESS • Tidak ada informasi di situs web AFD tentang pelaksanaan proyek PEEB ini di: https://www.afd.fr/en/actualites/solid-partnerships-making-buildings-sustainable • Tidak ada informasi di situs web PEEB tentang proyek didanai GCF, di: https://www.peeb.build/

Profil Proyek -10 	Bank Pembangunan Korea (KDB) mengusulkan FP196 Mendukung Mekanisme Inovatif untuk Pembiayaan Efisiensi Energi Industri di Indonesia dengan Pelajaran untuk Ditiru di Negara Anggota ASEAN lainnya, yang merupakan paket solusi efisiensi energi inovatif termasuk mekanisme de-risking keuangan, eksplorasi model bisnis layanan energi baru, pengembangan kerangka regulasi yang mendukung, dan bantuan teknis. Program ini akan meningkatkan kapasitas Indonesia untuk mendorong jalur pembangunan rendah karbon dengan peningkatan efisiensi energi dan kinerja konservasi dengan mengatasi hambatan kronis ini. Negara: Indonesia Area hasil: Bangunan, kota, industri, dan peralatan Mitigasi; Kategori ESS: Intermediasi-2; Skala menengah Entitas Terakreditasi: Korea Development Bank (KDB) Entitas Pelaksana: Untuk pembiayaan efisiensi energi: Lembaga Keuangan Lokal (Lembaga Keuangan Lokal atau LFI): • PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) • PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) • PT KEB Hana Indonesia (Hana Indonesia) • PT Bank IBK Indonesia (IBK Indonesia) • KB Bukopin (KB Indonesia) • PT Bank Shinhan Indonesia (Shinhan Indonesia). • PT Bank Woori Saudara Indonesia (Woori Indonesia) Persetujuan: 20 Oktober 2022 di BM34 Perkiraan masa berlaku: 20 tahun Untuk mekanisme pengurangan risiko dan Bantuan Teknis untuk Kesiapan: ASEAN Centre for Energy (ACE): Organisasi antarpemerintah yang berpusat di Jakarta dalam struktur ASEAN Informasi proyek di https://www.greenclimate.fund/project/fp196
Pembiayaan	Sektor swasta Total nilai proyek: USD 247,7 juta • Pembiayaan GCF: jaminan USD 100 juta, hibah USD 5 juta • Pembiayaan bersama: • pinjaman USD 142.700 juta, ekuitas dan barang. Pencairan danaGCF: tidak ada informasi
Fitur Utama Rencana Proyek untuk Indonesia	Proyek ini akan memilih beberapa provinsi tempat industri yang padat energi atau kompleks industri yang relevan terkonsentrasi (seperti Jabodetabek, Jawa Timur/Barat/Tengah, Banten, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan/Utara) sebagai penerima manfaat akhir atau lokasi untuk subproyek. Bank Pembangunan Korea, Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial yang Mendukung Mekanisme Inovatif untuk Pembiayaan Efisiensi Energi Industri di Indonesia dengan Pelajaran untuk Direplikasi di Negara Anggota ASEAN lainnya, 26 July 2022, Project No.: 0578542, at: https://www.kdb.co.kr/wcmscontents/pdf/ESMS_English.pdf

Pandangan CSO terhadap proposal proyek	GCF tidak boleh mendukung proyek ini karena penerima manfaatnya meliputi industri petrokimia dan kertas, yang oleh kelompok lokal dan masyarakat adat disebut sebagai industri yang terkenal karena pembuangan limbahnya dan memiliki catatan buruk dalam hal hak asasi manusia, standar ketenagakerjaan, kerusakan lingkungan, dan penggusuran penduduk. GCF harus menetapkan persyaratan untuk memastikan perlindungan lingkungan dan sosial setelah proyek disetujui. Kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan internasional dan hak asasi manusia juga harus menjadi bagian dari kriteria kelayakan. Kriteria subproyek harus mengamanatkan pengurangan emisi dan kerusakan lingkungan yang substansial di samping perlindungan dan promosi hak asasi manusia, termasuk kesehatan, dan tidak hanya memungkinkan peralihan dari satu pendekatan sektoral yang merugikan ke pendekatan sektoral lainnya. Proposal harus menyajikan Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat, sebagaimana diwajibkan oleh Kebijakan Masyarakat Adat, bahkan jika lokasi dan ukuran masing-masing subproyek saat ini tidak diketahui di tingkat program, melalui keterlibatan Masyarakat Adat, masyarakat lokal, dan kelompok masyarakat sipil sebelum persetujuan subproyek untuk menyuarakan apakah pembiayaan akan menyebabkan kerusakan lingkungan atau sosial. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait Daftar Pengecualian: Program tersebut harus mengecualikan sektor petrokimia dan secara eksplisit menambahkannya ke Daftar Pengecualian. Karena gas juga merupakan bahan bakar fosil, Daftar Pengecualian harus menghapus 'gas alam' dari pengecualian daftar tersebut. Daftar tersebut menyiratkan bahwa program tersebut akan mengizinkan investasi dalam proses industri dengan peralatan yang ada yang menggunakan bahan bakar fosil selama investasi tersebut tidak memperpanjang masa pakai peralatan yang ada. Energi dari limbah, sebagai pendekatan yang sangat bermasalah terhadap pembangkitan energi dengan dampak negatif pada kesehatan dan kualitas udara, diposisikan secara umum sebagai alternatif batu bara. Ada bias nasional ketika lima dari tujuh "Lembaga Keuangan Lokal" (LFI) yang dipilih oleh KDB merupakan anak perusahaan lokal dari bank-bank Korea, bukan pemilihan berdasarkan LFI yang mungkin paling tepat untuk melayani kebutuhan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Intervensi CSO pada Rapat Dewan GCF ke 34 di https://docs.google.com/document/d/1o2qHzHNZF1pLnx101txKXdZCIZXiZMUdlhE2_TZjhU/edit#heading=h.5mi4ja6c2kxi
--	---

Rencana Aksi Gender (RAG)	Dampak positif gender utama yang diharapkan dari program ini meliputi hal-hal berikut: • Promosi pembuatan kebijakan dan penganggaran yang responsif gender di tingkat perusahaan dan nasional • Meningkatkan pemahaman lembaga keuangan lokal dan badan pemerintah tentang aspek gender dalam pelaksanaan Program • Mengarusutamakan indikator gender selama penyaringan aplikasi proyek dan pelaksanaan proyek Kegiatan untuk mencapai dampak tersebut adalah: Di tingkat program: • Mengintegrasikan pendekatan inklusif gender dan partisipasi dalam kebijakan dan kerangka peraturan untuk EE, serta meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender lembaga keuangan lokal; • Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan/audiens dari bisnis milik perempuan selama pembentukan mekanisme promosi EE untuk replikasi regional; Di tingkat proyek: • Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam EE, terutama bagi karyawan perempuan dan pemilik bisnis; dan • Memaksimalkan manfaat gender dari keuangan EE. https://www.greenclimate.fund/document/gender-action-plan-fp196-supporting-innovative-mechanisms-industrial-energy-efficiency dated 20 October 2022 Status implementasi RAG Tidak ada informasi atau laporan tentang implementasi GAP. Pandangan CSO terhadap GAP Sasaran pengarusutamaan gender dalam program ini tidak ambisius. Dinyatakan bahwa minimal 20% dari entitas yang menerima dukungan pengembangan kapasitas harus dipimpin oleh perempuan, dan minimal 30 dari peserta individu harus perempuan. Namun, program ini mengutip estimasi IFC bahwa 43% UKM formal dimiliki oleh perempuan di Indonesia. Dengan demikian, target pembiayaan yang diproyeksikan sebesar 30% lebih rendah dari pangsa UKM yang dipimpin perempuan yang dilaporkan di pasar Indonesia. Intervensi CSO pada Rapat Dewan GCF ke 34 di https://docs.google.com/document/d/1o2qHzHNZF1pLnx101txKXdZCIZXiZMUdIhE2_TZjhU/edit#heading=h.5mi4ja6c2kxi
Status Implementasi	Tidak ada laporan kinerja tahunan atau informasi lain tentang kemajuan atau implementasi proyek di situs web GCF. Pada tanggal 9 November 2022, ASEAN Center for Energy (ACE) bersama dengan Korean Development Bank (KDB), Korea Energy Agency (KEA), PT. Indonesia Infrastructure Finance (IIF), PT. Bank KEB Hana Indonesia, PT. Bank IBK Indonesia Tbk, PT Bank KB Bukopin, PT Bank Shinhan Indonesia, dan PT. Bank Woori Saudara Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kemitraan dan kerja sama untuk Program “Mendukung Mekanisme Inovatif untuk Pembiayaan Efisiensi Energi Industri di Indonesia dengan Pelajaran untuk Direplikasi di Negara Anggota ASEAN lainnya”. https://aseanenergy.org/post/mou-signing-ceremony-to-advance-industrial-energy-efficiency-highly-innovative-finance-mechanism/

Tantangan dalam Pemantauan	Kurangnya informasi tentang status pelaksanaan proyek. • Situs web GCF dan NDA Indonesia hanya mencantumkan dokumen yang terkait dengan proposal proyek. • Situs web KDB tidak menyediakan informasi apa pun tentang FP 196 • Situs web ASEAN Center for Energy (ACE) hanya menyediakan informasi tentang upacara penandatanganan MOU dan lowongan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan MOU.
-----------------------------------	--

Profil Proyek-11 	Proposal Pendanaan Green Guarantee Company (GGC) disetujui meskipun ada penentangan dari Anggota Dewan negara-negara berkembang karena berbagai masalah seperti kepemilikan negara, perlunya proyek karena redundansinya, dan kurangnya rekam jejak di antara yang lainnya. Oleh karena itu, persetujuan ditunda untuk konsultasi lebih lanjut hingga hari berikutnya dari Rapat Dewan. GGC adalah lembaga global pertama yang didedikasikan untuk memberikan jaminan bagi obligasi iklim dengan dampak adaptasi dan mitigasi iklim yang signifikan. Lembaga ini akan mengatasi masalah pendanaan iklim yang tidak memadai dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang dengan mengurangi risiko investasi sektor swasta internasional dalam proyek-proyek mitigasi dan adaptasi. Negara: Gabon, Rwanda, India, India, Laos, Filipina, Brasil, dan Trinidad & Tobago Area hasil: • Mitigasi: (1) Bangunan, kota, industri, dan peralatan; (2) Pembangkitan dan akses energi • Adaptasi: (1) Keamanan kesehatan, pangan, dan air; (2) Infrastruktur dan lingkungan binaan; (3) Transportasi Kategori ESS lintas sektor: Intermediasi-2; Skala besar Entitas Terakreditasi: MUFG Bank Ltd. Entitas Pelaksana: 1. Green Guarantee Company ("GGC") 2. Development Guarantee Group 3. GCF Holdings, badan usaha dengan tujuan khusus yang didirikan semata-mata untuk investasi GCF di GGC 4. Manajer GCF Holdings Persetujuan: 20 Oktober 2022 di BM34 Perkiraan masa berlaku: 20 tahun Informasi proyek di https://www.greenclimate.fund/project/fp197
Usulan Perubahan	Usulan perubahan pada tanggal 11 Juli 2023 di B36 untuk FP dianggap rahasia dan telah dibahas dalam sesi eksekutif. Namun, status usulan perubahan tersebut tidak diketahui. Dapat diingat kembali bahwa di B34, Dewan mengkritik proyek tersebut karena beberapa surat tidak keberatan (NOL) yang gagal diperolehnya, dan bahwa proyek tersebut memiliki banyak risiko finansial. Setelah banyak bolak-balik, FP disetujui tetapi jumlah penuh yang diminta oleh AE tidak disetujui. MUFG diminta untuk kembali setelah mereka memperoleh lebih banyak NOL dan bahwa co-financier lainnya telah sepenuhnya memenuhi janji ekuitas mereka.
Pembiayaan	Sektor swasta Total Pembiayaan: USD 363 juta Pembiayaan GCF: USD 40,5 juta ekuitas Pembiayaan Bersama: USD 322,5 juta ekuitas Pecairan dana GCF 100%

Fitur Utama Rencana Proyek untuk Indonesia	GGC akan mendukung pengembangan pasar keuangan cerdas iklim di Indonesia. Selain itu, GGC dan penerbit juga akan mendukung penataan instrumen utang yang ditempatkan secara privat untuk membiayai proyek-proyek yang mematuhi Prinsip Obligasi Hijau Global dan Kerangka Obligasi Sosial, instrumen keuangan baru.
Pandangan CSO terhadap Usulan Proyek	Penolakan keras CSO terhadap proposal tersebut dengan alasan bahwa proposal proyek: • tidak memberikan banyak perincian tentang cara memantau dampak iklim; • tidak meyakinkan tentang cara menerapkan standar lingkungan, sosial, dan gender. • memiliki masalah kepemilikan negara karena kurangnya keterkaitan dengan NDC negara tersebut dan bukti konsultasi pemangku kepentingan. • daftar negara tersebut tidak koheren, dan tidak jelas apakah jaminan untuk obligasi merupakan bentuk dukungan yang efektif di beberapa negara tersebut, yang telah memiliki pasar keuangan yang berkembang dengan baik (seperti Brasil, Filipina, atau Indonesia). • Tidak ada prioritas atau alokasi dukungan minimum yang diramalkan untuk negara-negara LDC, SIDS, dan Afrika yang termasuk dalam proposal ini, sejauh mereka memiliki pasar keuangan yang kurang berkembang dan, karenanya, paling membutuhkan pendekatan jaminan tersebut. • masalah dengan pengungkapan informasi karena lampiran inti dari proposal pendanaan tidak tersedia untuk umum karena pengungkapan yang selektif. Intervensi Jaringan CSO Pemantau GCF pada Rapat Dewan GCF ke-34, di https://docs.google.com/document/d/1o2qHzHNZF1pLnx101txKXdZCIZXziZMUdIhE2_TZjhU/edit#heading=h.5mi4ja6c2kxi

Rencana Aksi Gender (RAG)	Dalam memobilisasi modal utang swasta yang signifikan terhadap proyek-proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, GGC akan, dengan kemampuan terbaiknya, mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang lebih besar di negara-negara dan sektor-sektor sasaran melalui: - pembentukan proses dan sistem organisasi untuk meningkatkan hasil kesetaraan gender - memastikan pengembangan penilaian dan rencana aksi gender (GAP) tingkat proyek - perlindungan yang peka gender dan konsultasi pemangku kepentingan dilaksanakan untuk memungkinkan proses-proses yang inklusif gender, yang mengarah pada desain proyek yang responsif gender. Analisis M&E mengonfirmasi bahwa desain proyek yang responsif gender mendukung hasil kesetaraan yang lebih besar peningkatan kapasitas kelembagaan pemilik proyek untuk mengembangkan dan melaksanakan proyek-proyek yang mengarah pada hasil kesetaraan yang lebih besar https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gap-fp197.pdf Status implementasi RAG Tidak ada informasi atau laporan tentang implementasi GAP Pandangan CSO terhadap RAG Penilaian gender hanyalah survei terhadap kebijakan yang ada di negara sasaran dan bagaimana kebijakan tersebut secara umum berjalan ketika standar internasional diterapkan. Meskipun AE telah mengindikasikan bahwa penilaian dan GAP akan diperlakukan sebagai dokumen hidup yang perlu diperbarui, proposal pendanaan secara eksplisit menyatakan bahwa keduanya tidak akan memiliki pengaruh sedikit pun dalam membentuk komponen gender dan E&S karena fokusnya akan berada pada proyek-proyek yang siap untuk penutupan keuangan. Apa yang disebut "penyaringan awal" melalui kartu skor ini tidak memberikan cara yang jelas untuk mencapai tujuan kebijakan gender GCF, seperti meminimalkan risiko sosial dan terkait gender dalam semua tindakan iklim dan berkontribusi untuk mengurangi kesenjangan gender dalam kerentanan sosial-ekonomi yang diperburuk oleh perubahan iklim. Lebih buruk lagi, proposal pendanaan berupaya untuk mencapai mobilisasi keuangan skala besar, yang berdampak pada upaya menuju kesetaraan gender di tingkat akar rumput dan masyarakat, di mana keuangan dan tindakan iklim paling dibutuhkan. Proposal pendanaan tampaknya hanya merupakan renungan atau efek limpahan daripada tujuan yang signifikan dan disengaja. Perlu ada lebih banyak komponen proyek yang disengaja dan langsung yang memprioritaskan kesetaraan gender daripada menjadikan kesetaraan gender sebagai renungan atau sekadar persyaratan lain yang harus dipertimbangkan untuk pendanaan GCF. Intervensi Jaringan CSO Pemantau GCF pada Rapat Dewan ke 34 di https://docs.google.com/document/d/1o2qHzHNZF1pLnX101txKXdZCIZXiZMUdIhE2_TZjhU/edit#heading=h.5mi4ja6c2kxi
Status implementasi	Tidak ada informasi atau laporan tentang pelaksanaan proyek di Indonesia pada GCF, atau GGC di https://greenguarantee.co/ situs web MUFG di https://www.mufg.jp/english/profile/index.html

Tantangan dalam Pemantauan	Kurangnya informasi mengenai status pelaksanaan proyek di situs web GCF, GGC dan MUFG
-----------------------------------	---

Profil proyek -12 	Inisiatif Mitigasi Risiko Energi Terbarukan Berkelanjutan (SRMI) Facility Phase 2 Resilience Focus (SRMI-Resilience) FP204 ini bertujuan untuk mendukung transisi energi dengan meningkatkan akses terhadap listrik yang terjangkau, andal, modern, dan berkelanjutan. Proyek ini akan membantu negara-negara mengembangkan program transisi energi dan membangun proses pengadaan yang solid yang diperlukan untuk menarik investasi swasta. Selain itu, karena setiap negara memiliki hambatan pasar unik yang perlu diatasi, proyek ini akan memberikan pengetahuan yang sangat dibutuhkan tentang bagaimana sektor publik dan swasta dapat bekerja sama dalam menantang pasar energi terbarukan. Negara: Ethiopia, Guinea-Bissau, Indonesia, Kyrgyzstan, Mongolia, Seychelles, Somalia, Tajikistan, Tunisia Area hasil: • Mitigasi: (1) Pembangkitan dan akses energi • Adaptasi: (1) Infrastruktur dan lingkungan binaan; (2) Mata pencaharian masyarakat dan komunitas lintas sektoral; Kategori ESS A; Skala besar Entitas Terakreditasi: Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan dan Asosiasi Pembangunan Internasional (Bank Dunia) Entitas Pelaksana di Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan bertindak melalui Kementerian Energi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN – Perusahaan Utilitas Negara) Persetujuan: 16 Maret 2023 pukul BM35 Perkiraan umur: 25 tahun untuk proyek tenaga surya dan angin; 50 tahun + untuk infrastruktur jaringan Informasi proyek di https://www.greenclimate.fund/project/fp204
Pembiayaan	Sektor publik Total Pembiayaan: USD 1,1 miliar • Pembiayaan GCF: USD 69 juta (pinjaman senior), USD 13 juta (jaminan), USD 35 juta (hibah yang dapat diganti), USD 43 juta (hibah) • Pembiayaan Bersama: USD 959 juta Pencairan dana GCF 1%

**Fitur Utama Rencana
Proyek untuk Indonesia**

- pengembangan peningkatan jaringan dan solusi untuk meningkatkan integrasi Energi Terbarukan Variabel (VRE) dan keandalan serta ketahanan jaringan;
- penyebaran 400 MWp dengan sistem penyimpanan energi baterai (BESS) milik Produsen Daya Independen (IPP) melalui bantuan teknis untuk memilih IPP, dan mendukung jaringan agar menjadi tangguh terhadap guncangan iklim melalui standar teknis khusus bahaya iklim baru.
- program elektrifikasi untuk populasi (menambahkan 2,4 juta orang ke jaringan) agar menjadi lebih tangguh terhadap perubahan iklim melalui pemenuhan kebutuhan pendinginan mereka untuk menghadapi gelombang panas yang meningkat. • mendukung Kerangka Kerja Elektrifikasi Berbiaya Rendah Berkelanjutan Indonesia (ISLE), yang dikembangkan bersama pada tahun 2019- 2020 oleh Bank Dunia dan PLN, yang bertujuan untuk (i) mengurangi biaya pembangkitan listrik di Kepulauan Timur, (ii) meningkatkan keandalan jaringan dengan mengembangkan langkah-langkah yang jelas tentang cara menilai kerugian listrik dan kurangnya keandalan, dan (iii) mengurangi beban keuangan pada PLN dengan memobilisasi investasi swasta.

<https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/fp204-world-bank-multiple-countries.pdf>

Pandangan CSO terhadap proposal proyek	• Kekhawatiran tentang asumsi mendasar bahwa jika investasi sektor swasta tercapai, maka pengurangan emisi terkait diklaim, dan jika pinjaman publik mendanai infrastruktur tenaga surya dan angin, maka akan menghasilkan tambahan investasi sektor swasta sebesar USD 1,8 miliar. • Penghindaran emisi yang diklaim adalah hasil skenario kasus terbaik tetapi jauh dari pasti, tanpa jaminan minimum yang diberikan; pada saat yang sama, proposal tersebut gagal memperhitungkan emisi karbon yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur, yang berada dalam cakupan program. • Program tersebut, termasuk semua subproyek, dikategorikan A karena kemungkinan akuisisi lahan dengan pemukiman kembali terkait (termasuk yang tidak sukarela) dari Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Pengamanan Bank Dunia pada dasarnya tidak setara dengan mencari persetujuan awal tanpa paksaan dari Masyarakat Adat dan, oleh karena itu, menuntut agar entitas terakreditasi menggunakan Kebijakan Masyarakat Adat GCF sebagai standar untuk memastikan diperolehnya FPIC. • Karena subproyek yang diusulkan berisiko tinggi, Dewan harus menetapkan bahwa Bank Dunia mengungkapkan informasi ESS untuk subproyek tersebut 120 hari sebelum keputusan dibuat kepada Pengamat Aktif dan Dewan melalui Sekretariat dan bahwa tautan yang relevan harus diunggah di halaman web GCF program tersebut. • Penerbitan surat pernyataan tidak keberatan di negara tuan rumah untuk subproyek program ini harus mengikuti proses partisipatif dan konsultatif yang sejalan dengan prinsip kepemilikan negara. Setidaknya dalam kasus Indonesia sebagai salah satu negara peserta, kelompok masyarakat sipil telah menyatakan keberatan mereka terhadap penyertaan Indonesia dalam program ini melalui surat terbuka. • Komponen mitigasi risiko dalam program ini harus mencakup keterlibatan sektor publik dan swasta untuk melindungi pemerintah dari risiko semakin terlilit utang dalam mengambil tindakan iklim, dalam konteks ini, membangun infrastruktur energi terbarukan. https://docs.google.com/document/d/1x0akRkGeQl7sHt1yqlFRjIP1o4z5WJMow3Zsm8AAB8/edit Indonesian CSO and individuals rejection letter: Surat penolakan LSM dan individu Indonesia: Surat yang ditandatangani oleh 52 LSM dan individu Indonesia kepada NDA Indonesia pada 10 Maret 2023 menyatakan keberatan atas pemberian NOL kepada Bank Dunia untuk proposal proyek ini. Surat tersebut juga dikirimkan kepada Direktur Eksekutif GCF pada 10 Maret 2023 sebagai informasi dan catatan. Persoalan utama keberatan tersebut adalah: • penerbitan NOL: kurangnya proses yang inklusif dan terbuka, sehingga pandangan masyarakat yang berpotensi terkena dampak tidak dipertimbangkan; tidak ada informasi tentang subproyek, • RAG: kurangnya analisis gender dalam sub-proyek, GAP tidak dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata perempuan dan anak perempuan serta kesenjangan gender yang ada di wilayah sub-proyek. • Ada pembelajaran dari proyek Bank Dunia lainnya: FP083 Proyek Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi Indonesia (GREM): setelah 4,5 tahun, masih kekurangan informasi mengenai sub-proyek tersebut.
--	--

Rencana Aksi Gender (RAG)	Program ini akan mengikuti pendekatan sistematis dan menyediakan dukungan silang untuk intervensi subproyek guna mempersempit kesenjangan gender dengan fokus pada dialog kebijakan, pengumpulan data, pelatihan, dan kegiatan peningkatan kapasitas. Dampak yang diharapkan mencakup peningkatan partisipasi ekonomi perempuan di sektor energi, peningkatan akses ke listrik, dan penciptaan peluang untuk menghasilkan pendapatan bagi perempuan di komunitas yang terdampak. Fasilitas SRMI akan berfokus pada empat bidang utama berikut: Pengetahuan gender khusus sektor dan tingkat negara untuk mendukung desain dan implementasi proyek dihasilkan. i) Kebijakan dan lingkungan hukum yang mendukung partisipasi ekonomi ii) perempuan dipromosikan melalui kegiatan dialog kebijakan. iii) Intervensi proyek dan program yang disesuaikan untuk mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi dirancang dan diimplementasikan iv) Pengetahuan dan peluang pembelajaran ditingkatkan https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/fp204-gender-action-plan.pdf Status implementasi RAG Tidak ada informasi atau laporan tentang implementasi GAP Pandangan CSO terhadap RAG • Rencana Aksi Gender tingkat program yang diusulkan masih sangat mendasar dan perlu diperkuat dengan target dan jadwal yang konkret sebelum tahap pendanaan pertama dicairkan. • Jika disetujui, semua rencana aksi gender khusus subproyek harus diungkapkan di halaman web GCF program tersebut. https://docs.google.com/document/d/1x0akRkGeQl7sHt1ygleFRjIP1o4z5WJMow3Zsm8AAB8/edit
Status implementasi	Tidak ada informasi tentang pelaksanaan proyek di GCF, Bank Dunia, ESMAP, maupun situs web NDAS Indonesia tentang pelaksanaan proyek.
Tantangan dalam pemantauan	Kurangnya informasi tentang status pelaksanaan proyek. • Tidak ada informasi di situs web Bank Dunia tentang SRMI Fase 2 (SRMI Resilience), tetapi tentang SRMI Fase 1. • Dari empat dokumen yang tercantum di situs web GCF, hanya dokumen tentang laporan Pengamanan lingkungan dan sosial (ESS) untuk FP204: Fasilitas Inisiatif Mitigasi Risiko Terbarukan Berkelanjutan (SRMI) (fokus Fase 2 Resilience) (SRMI-Resilience) yang menyediakan tautan ke ESMAP (Program Bantuan Pengelolaan Sektor Energi). Bahkan dokumen proposal pendanaan tidak menyediakan informasi atau tautan ke ESMAP. ESMAP adalah perantara pengetahuan yang antara lain bekerja sama dengan Bank Dunia. ESMAP diatur oleh Kelompok Konsultatif (CG) yang terdiri dari perwakilan dari donor yang berkontribusi dan diketuai oleh Direktur Senior Kelompok Praktik Energi dan Ekstraktif Bank Dunia. Namun, ESMAP memberikan informasi singkat tentang persetujuan GCF untuk SRMI Fase 2, tidak ada informasi lebih lanjut tentang kemajuan proyek atau pelaksanaannya. • Situs web NDA Indonesia menyediakan dokumen yang sama dengan situs web GCF, tidak ada informasi tentang kemajuan atau laporan tentang implementasi proyek. https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/fp204-world-bank-srmi-phase-2.pdf https://www.esmap.org/

Profil proyek -13 	Meskipun ada kontroversi dan berbagai kekhawatiran yang muncul, GCF menyetujui proyek yang diusulkan ini. FMO, pengusul proyek, membuat pernyataan umum yang menyatakan komitmennya untuk mengakhiri deforestasi dan mempromosikan ekonomi hijau. &Green Fund akan bekerja untuk mengurangi emisi dan meningkatkan ketahanan masyarakat lokal dengan membiayai transformasi rantai pasokan komoditas pertanian tropis dari ekstraktif ke praktik berkelanjutan. Proyek ini akan mencapainya dengan memberikan bantuan teknis dan dukungan finansial kepada produsen dengan kondisi yang mengharuskan perlindungan dan pemulihan hutan yang ada dengan berfokus pada rantai pasokan di sektor-sektor yang mendorong deforestasi, seperti peternakan, minyak sawit, kedelai, karet, kakao, dan kehutanan. Negara: Brasil, Kamerun, Kolombia, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, Ekuador, Gabon, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Liberia, Zambia Area hasil: • Mitigasi: (1) Kehutanan dan penggunaan lahan • Adaptasi: (1) Kesehatan dan kesejahteraan, serta ketahanan pangan dan air; (2) Ekosistem dan layanan ekosistem Lintas sektor; Kategori ESS: Intermediasi-1 di tingkat program, dan A di tingkat subproyek; Skala besar Entitas Terakreditasi: Nederlandse Financierings- Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) Entitas Pelaksana: FMO dan Stichting AndGreen.Fund (“Dana &Green”) Persetujuan: 13 Juli 2023 di B36 Perkiraan masa berlaku: 15 tahun untuk fasilitas investasi; 5 tahun untuk fasilitas Bantuan Teknis Informasi proyek di https://www.greenclimate.fund/project/fp212
Pembiayaan	Sektor swasta Total Pembiayaan: USD 984,6 juta • Pembiayaan GCF: USD 189,3 juta (USD 180,7 juta dalam bentuk pinjaman subordinasi; USD 8,6 juta dalam bentuk hibah) • Pembiayaan Bersama: USD 780,7 juta (USD 180,7 juta dalam bentuk pinjaman subordinasi; USD 600 juta dalam bentuk pinjaman senior; USD 3 juta dalam bentuk kontribusi mitra umum) Pencairan dana GCF: 2%

Fitur Utama Rencana Proyek untuk Indonesia	Mendukung praktik pertanian berkelanjutan di sektor-sektor utama (minyak kelapa sawit untuk Indonesia) yang sebelumnya telah menerima atau mungkin masih menerima subsidi yang mendorong deforestasi. Fasilitas TA melibatkan para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan lingkungan yang mendukung praktik pertanian rendah emisi. Oleh karena itu, Dana tersebut memberi insentif kepada produsen, yang memungkinkan mereka berkontribusi pada ketahanan pangan dan meningkatkan mata pencaharian mereka (alasan utama subsidi) tanpa mendorong deforestasi. Intervensi Dana Hijau mendukung pengembangan dan penegakan kebijakan pemerintah dan kerangka peraturan yang efektif di setiap negara penerima investasi. Misalnya, moratorium minyak kelapa sawit pemerintah Indonesia bergantung pada peningkatan dan keberlanjutan produktivitas di perkebunan yang ada.
Pandangan CSO terhadap proposal proyek	CSO meminta Dewan untuk menolak persetujuan proposal proyek ini karena ini adalah proposal paling meresahkan yang pernah mereka lihat diajukan di hadapan dewan GCF hingga saat ini. Hal ini menimbulkan risiko yang signifikan terhadap reputasi GCF dan bertentangan dengan tindakan iklim yang adil yang ingin didukung oleh GCF. Rekam jejak &Green Fund yang ada menunjukkan bahwa mereka telah memberikan pembiayaan kepada beberapa perusahaan besar yang terlibat dalam penyebab deforestasi, termasuk perusahaan Brasil Marfrig dan dua perusahaan Indonesia, PT Hilton Duta dan PT. Dharma Satya. Perusahaan komoditas pertanian besar tersebut dapat mengakses pembiayaan dengan mudah. Kegagalan mereka untuk menerapkan praktik berkelanjutan bukan karena kurangnya dana tetapi karena keengganan mereka. Beberapa tindakan yang diusulkan program tersebut juga sangat bermasalah. Misalnya, proposal tersebut menyatakan bahwa program tersebut akan mendukung penciptaan perkebunan di lahan yang "terdegradasi". Namun, definisi lahan yang "terdegradasi" sangat diperdebatkan, dan ada beberapa kasus di mana fokus ini digunakan untuk menggusur dan melemahkan hak atas tanah Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Atau, untuk mengambil contoh kedua, salah satu strategi intervensi untuk kedelai adalah memindahkan tanaman ke daerah yang lebih tinggi yang berdekatan dengan kawasan lindung – yang berisiko menyebabkan lebih banyak deforestasi. Draf intervensi Jarigen CSO Pemantau GCFdi https://docs.google.com/document/d/1gb1sMbyGlrPsHRE2fU8zshN0Im9vPE56ysXnct3P2I/edit

Rencana Aksi Gender (RAG)	Komponen 1: Model komersial yang dapat diskalakan dan direplikasi yang dikembangkan untuk produksi komoditas bebas deforestasi: • Pendekatan gender yang dikembangkan akan memastikan bahwa investasi tersebut berada dalam (i) jalur yang peka gender atau (ii) jalur yang transformatif gender. • Mempromosikan kontribusi dana &Green ke sektor swasta menggunakan kerangka kerja gender dan hasil pengarusutamaan gender untuk promosi dan investasinya. • Dalam mengidentifikasi perusahaan dan organisasi klien, @Green akan terus mengembangkan investasi yang peka gender dan transformatif gender. • Melaksanakan proses uji tuntas menyeluruh dalam suatu transaksi, menilai dasar gender, dan merancang jalur yang peka gender atau transformatif. • Gender arus utama memastikan replikasi dan peningkatan yang peka gender atau transformatif gender, dan perempuan merupakan bagian aktif dari transisi menuju rantai pasokan yang berkelanjutan. Komponen 2: Fasilitas Bantuan Teknis membangun lingkungan yang mendukung perlindungan hutan dan perlindungan komoditas yang tahan terhadap iklim • Mengembangkan strategi gender untuk intervensi nasional yang relevan guna menciptakan cetak biru yang peka terhadap gender atau yang bersifat transformatif terhadap gender. • Menerapkan Kerangka Kerja Gender &Green dalam fase pra-investasi untuk berkontribusi terhadap target dampak gender; penilaian gender dalam aktivitas uji tuntas untuk transaksi yang peka terhadap gender. • Menerapkan bantuan teknis pasca-investasi untuk mendukung perusahaan dalam memaksimalkan dampak sosial dan lingkungan, mengamankan skalabilitas dan ketahanan dampak, dan meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan pada lanskap produksi komoditas yang lebih luas. • Produk pengetahuan dan pengembangan investasi yang bersifat transformatif terhadap gender akan mendokumentasikan praktik terbaik dan pelajaran yang dipetik. • Mengembangkan penilaian bahaya iklim dan menyertakan analisis gender untuk mengatasi hambatan gender dan pendorong iklim. • Pelaporan indikator gender yang relevan melalui sistem MRV yang ditingkatkan akan melacak kemajuan pada target gender yang diidentifikasi sebelum investasi, khususnya yang disuling untuk jalur transformatif gender. RAG untuk FP212: &Green Fund: Investing in Inclusive Agriculture and Protecting Forests, 13 July 2023 di https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/fp212-gender-action-plan.pdf Status implementasi RAG Tidal ada informasi atau laporan mengenai implementasi RAG Pandangan CSO terhadap RAG Seperti yang sering terjadi pada program, rencana aksi gender menyajikan tindakan yang terlalu luas dan kurang spesifik, sehingga tampaknya mengabaikan dan gagal mengatasi tantangan yang diidentifikasi dalam penilaian gender. Draf intervensi Jarigen CSO Pemantau GCFdi https://docs.google.com/document/d/1gb1sMbyGlrPsHRE2fU8zshN0lm9vPE56ysXnct3P2l/edit
Status Implementasi	FAA baru efektif sejak 21 Februari 2024.

Tantangan dalam pemantauan	Tidal ada laporan perkembangan proyek pada situs web GCF, FMO, &Green maupun NDA Indonesia
-----------------------------------	--

Profil proyek -14 	Di BM37, GCF menyetujui proposal Program Kemitraan Ketahanan Komunitas (CRPP) yang berfokus pada tiga area utama: Memperkuat kapasitas kelembagaan dan komunitas untuk memberikan langkah-langkah adaptasi di tingkat local. Meningkatkan informasi dan sistem untuk memberikan investasi yang mempertimbangkan risiko iklim dalam skala besar. Menyediakan mata pencaharian yang pro-rakyat miskin dan investasi infrastruktur yang tangguh terhadap iklim. Negara: Kamboja, Indonesia, Laos, Pakistan, Papua Nugini, Timor Leste, dan Vanuatu. Area hasil: • Orang dan komunitas yang paling rentan; • Kesehatan dan kesejahteraan, serta ketahanan pangan dan air; • Infrastruktur dan lingkungan binaan; dan • Ekosistem dan layanan ekosistem Adaptasi, skala besar, kategori ESS: Intermediasi-2 Entitas Terakreditasi: Bank Pembangunan Asia Persetujuan: 25 Oktober 2023 di B37 Perkiraan masa pakai: 10 tahun Informasi proyek https://www.greenclimate.fund/project/fp215
Pembiayaan	Sektor publik Total nilai proyek: USD 750 juta • GCF: hibah USD 100 juta dan pinjaman USD 20 juta • Pembiayaan bersama: USD 630 juta dari hibah USD 95 juta dan pinjaman USD 535 juta Pencairan pembiayaan GCF: tidak ada informasi
Fitur Utama Rencana Proyek untuk Indonesia	Tidak ada yang secara khusus ditujukan untuk Indonesia, meskipun ada penjelasan mengenai rencana proyek utama untuk 6 negara lainnya.
Pandangan CSO mengenai proposal proyek	Meskipun jaringan pengamat CSO GCF mengakui potensi program ini untuk menanggapi dampak iklim yang secara khusus dihadapi oleh negara-negara di Asia dan Pasifik, konsep yang diklaim tentang adaptasi yang dipimpin secara lokal dan agroekologi dalam proposal tersebut tampaknya disalahartikan. Sementara kegiatan indikatif dalam proposal tersebut mengklaim dipimpin secara lokal dan selaras dengan agroekologi, terdapat potensi kesenjangan dalam struktur tata kelola dan kepemilikan negara dalam proposal ini. Mengulangi penilaian ITAP, terdapat ketiadaan entitas pelaksana khusus untuk setiap negara, serta rencana keterlibatan pemangku kepentingan yang lemah. CSO menyerukan pelembagaan proses keterlibatan pemangku kepentingan lokal yang lebih transparan dan konkret untuk memaksimalkan pengembangan, implementasi, dan dampak jangka panjang program terhadap masyarakat lokal. https://www.gcfwatch.org/wp-content/uploads/2023/10/GCFWatch_B37_FP215.pdf

Rencana Aksi Gender (RAG)	Program Kemitraan Ketahanan Komunitas (CRPP) mengembangkan dua program yang ditujukan untuk perempuan, yaitu (1) Jendela Gender Dana Perwalian (TF) untuk Investasi, yang secara eksplisit bertujuan untuk memperkuat ketahanan perempuan terhadap perubahan iklim, dan (2) Dana Investasi (IF) untuk peluncuran langkah-langkah adaptasi lokal yang efisien melalui investasi hilir. Jendela gender secara khusus menyediakan bantuan teknis dan hibah untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengimplementasikan investasi yang secara eksplisit memperkuat ketahanan perempuan miskin, serta investasi adaptasi yang dipimpin oleh perempuan dengan fokus khusus untuk mendukung perempuan dalam membangun ketahanan mereka. Sementara itu, Dana Investasi bertujuan untuk meningkatkan hasil kesetaraan gender dari investasi di negara- negara CRPP. Status Implementasi RAG Belum ada informasi mengenai status implementasi RAG Pandangan CSO terhadap RAG Tidak ada
Status implementasi	Tidak ada informasi perkembangan status implementasi
Tantangan dalam pemantauan	Tidak ada pembaruan atau laporan tentang status implementasi selain dokumen yang disediakan untuk pembahasan proposal proyek di situs web GCF, NDA Indonesia, dan ADB.

Profil proyek -15	GCF menyetujui proposal proyek ini melalui pemungutan suara. Hanya Anggota Dewan dari Tiongkok yang memberikan suara menentang persetujuan paket pendanaan tersebut. Anggota Dewan dari Antigua dan Barbuda serta Republik Dominika mempertanyakan alokasi pendanaan dalam proposal program multi- negara dan menyatakan kekhawatiran bahwa negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang (SIDS) mungkin tidak menerima sebagian kecil dari pendanaan tersebut. Sekretariat dan AE, MUFG, menanggapi dengan memastikan batas minimum investasi per negara dan meningkatkan pelaporan keuangan. https://www.gcfwatch.org/resources/board-meeting-resources/37th-board-meeting-of-the-gcf Proyek GAIA akan membangun platform keuangan campuran yang menawarkan pinjaman jangka panjang untuk investasi adaptasi dan mitigasi iklim di 19 negara yang rentan terhadap iklim. Platform Proyek ini mengalokasikan 70 persen dari investasi portofolionya untuk proyek adaptasi; dengan alokasi lebih lanjut sebesar 25 persen untuk Negara-negara yang Kurang Berkembang dan Negara-negara Kepulauan Kecil yang Berkembang. Negara: • Afrika: Benin, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Mauritius, Maroko, Tanzania, Togo • Asia: India, Indonesia, Mongolia, Filipina • Amerika Latin dan Karibia: Barbados, Kosta Rika, • Republik Dominika, Guatemala, Jamaika, Panama, Peru Wilayah hasil: • Mitigasi: (1) Pembangkitan dan akses energi; (2)Transportasi rendah emisi • Adaptasi: (1) Kesehatan dan kesejahteraan, serta ketahanan pangan dan air; (2) Infrastruktur dan lingkungan binaan; (3) Ekosistem dan layanan ekosistem • Lintas sektor; Kategori Risiko: Intermediasi-1 (Risiko Tinggi); Skala besar Entitas Terakreditasi: MUFG Bank, Ltd Entitas Pelaksana: 1. GAIA Climate Loan Fund Limited Partnership (GAIA LP, Dana) 2. Mitra Umum GAIA (GP) 3. Manajer Investasi 4. GCF GAIA Holdco SPV 5. Manajer GCF GAIA Holdco SPV Persetujuan: 25 Oktober 2023 di B37 Perkiraan masa berlaku: 30 tahun https://www.greenclimate.fund/project/fp223
Pembiayaan	Sektor swasta Total Pembiayaan: USD1,48 miliar Pembiayaan GCF: USD152,5 juta Pembiayaan Bersama: USD1,375 miliar (pinjaman senior USD 295 juta dari MUFG; pinjaman senior USD 75 juta dari dan ekuitas USD 70 juta dari FinDev Canada; pinjaman senior USD 25 juta dari LGIM; ekuitas USD 90 juta oleh pemberi pinjaman dan investor lain) Pencairan pembiayaan GCF: tidak ada informasi

Fitur utama pendanaan untuk Indonesia	Tidak ada fitur khusus yang disebutkan untuk Indonesia
Pandangan CSO terhadap proposal proyek	CSO sangat tidak setuju dengan usulan pendanaan tersebut karena kekhawatiran tentang kurangnya investasi yang dikonfirmasi, yang meragukan potensi investasi yang diklaim. Mereka juga mengemukakan tidak adanya pengungkapan mengenai alokasi negara, jalur subproyek, dan potensi risiko yang terkait dengan pembiayaan biofuel, serta tindakan yang tidak memadai yang diambil untuk memenuhi kebijakan gender dan jaminan sosial di sekitar proyek. https://www.gcfwatch.org/resources/board-meeting-resources/37th-board-meeting-of-the-gcf
Rencana Aksi Gender (RAG)	• Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan intervensi dan inovasi perubahan iklim melalui pendekatan gender yang komprehensif • Mempromosikan keseimbangan gender dalam platform Gaia dan di seluruh Entitas Proyek • Memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan • Meminimalkan risiko sosial dan terkait gender dalam proyek yang disetujui • Mengurangi kesenjangan gender akibat kerentanan dan pengecualian sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diperburuk oleh perubahan iklim • Menilai, menghindari, dan mencegah risiko atau potensi dampak buruk terhadap perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki terkait Eksploitasi Seksual, Pelecehan Seksual, dan Pelecehan Seksual (SEAH) Laporan RAG tertanggal 25 Oktober 2023 di https://www.greenclimate.fund/document/gender-action-plan-fp223-project-gaia-gaia
Status Implementasi	MUFG menunjuk Climate Fund Managers (CFM) sebagai pengelola dana untuk proyek Gaia pada 4 Desember 2023. Sebagai pengelola dana alternatif (AIFM), CFM telah menunjuk Pollination, firma penasihat global yang berfokus pada iklim dan alam, sebagai Penasihat Strategisnya. Saat ini CFM mengelola dua dana infrastruktur pasar berkembang: Climate Investor One dan Climate Investor Two, keduanya dibiayai oleh GCF. https://climatefundmanagers.com/2023/12/04/climate-fund-managers-appointed-investment-manager-of-gaia-lp-a-usd1-48-bn-target-climate-focused-emerging-market-private-debt-platform/
Tantangan dalam Pemantauan	Tidak ada informasi perkembangan tentang proposal ini setelah disetujui di situs web GCF, NDA dan MUFG.

Profil proyek-16 	Proposal pendanaan ini bertujuan untuk mendorong peralihan ke sistem transportasi umum yang nyaman dan modern melalui metode non-motor dan mobilitas mikro elektrik di kota-kota besar. Selain itu, proposal ini mengintegrasikan langkah-langkah anti-iklim untuk membantu menjaga infrastruktur transportasi dan meningkatkan ketahanan untuk mengatasi peristiwa cuaca ekstrem seperti gelombang panas, banjir, dan erosi tanah yang berpotensi membahayakan infrastruktur dan menyebabkan gangguan layanan untuk jaringan transportasi perkotaan. Dua Anggota Dewan (BM) menyampaikan kekhawatiran mengenai proposal pendanaan ini: BM dari Denmark mempertanyakan apakah konsultasi untuk pengembangan proposal pada tahun 2018 masih tetap ada setelah enam tahun. Sementara itu, BM dari Mesir mengklaim bahwa komponen ketahanan dan adaptasi proyek tampak "sedikit berlebihan" dibandingkan dengan masalah ketahanan dan adaptasi lain yang lebih mendesak yang harus ditangani. Ia tidak keberatan dengan persetujuan tersebut tetapi menyatakan bahwa ia "melindungi" dana hibah yang sangat sedikit yang digunakan untuk adaptasi dan ingin memastikan bahwa pendanaan adaptasi berbasis hibah. https://www.gcfwatch.org/gcfnews/b38-updates Negara: Armenia, Georgia, Indonesia, Kazakhstan, Republik Kirgistan, Nepal, Uzbekistan Area hasil: • Mitigasi: Transportasi rendah emisi • Adaptasi: Infrastruktur dan lingkungan binaan • Lintas sektor; Kategori Risiko ESS: B; Skala besar Entitas Terakreditasi: Bank Pembangunan Asia (ADB) Entitas Pelaksana: Entitas apa pun yang menandatangani perjanjian dengan ADB untuk melaksanakan atau mengimplementasikan Pinjaman dan Hibah Investasi Negara. Mungkin ADB sendiri untuk hibah bantuan teknis atau entitas lain yang mengadakan perjanjian hukum dengan ADB pada TA Persetujuan: 6 Maret 2024 di B38 Perkiraan masa berlaku: Informasi proyek di https://www.greenclimate.fund/project/fp225
Pembiayaan	Sektor publik Total Pembiayaan: USD 454,5 juta Kontribusi GCF: USD 169,92 (USD 64,92 juta dalam bentuk hibah; USD 105 juta dalam bentuk pinjaman) Pembiayaan Bersama: USD 284,48 juta (USD 240 juta dalam bentuk pinjaman; 44,48 juta dalam bentuk hibah) Pencairan dana GCF: tidak ada informasi

Fitur Utama Pendanaan untuk Indonesia	Opsi potensial: Sistem e-bus DAMRI untuk bus bandara, yang mencakup pengisian cepat di titik akhir dan analisis jaringan. Opsi ini akan membangun sistem model untuk menglistriki semua 13 koridor BRT (bus rapid transit) Transjakarta di Jakarta. Proposal tersebut mengalokasikan USD 70 juta OCR untuk meningkatkan sistem transportasi umum dan meningkatkan integrasi sistem moda BRT Pendukung juga mengirimkan misi pada tahun 2019 ke Indonesia (Jakarta dan Makassar) untuk menilai potensi proyek EV dan bertemu dengan Kementerian Perhubungan, PLN, Lingkungan Hidup, Energi, otoritas transportasi kota, operator transportasi umum, dan universitas. https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b38-02-add05-funding-proposal-package-fp225.pdf
---	---

Pandangan CSO terhadap Proposal Proyek	CSO menyampaikan komentar kritis mengenai kurangnya informasi tentang sumber mineral penting untuk baterai, risiko lingkungan dan sosial, dan konsultasi pemangku kepentingan yang tidak memadai. Jaringan tersebut juga menyoroti kekhawatiran tentang dampak proposal tersebut terhadap beban utang negara- negara sasaran, dan mendesak tindakan untuk mengurangi dampak buruk. Proposal tersebut mengabaikan risiko lingkungan dan sosial serta potensi peningkatan emisi karbon dari seluruh siklus hidup kendaraan listrik, termasuk pembangkitan listrik, pembuatan komponen, dan pengelolaan komponen di akhir masa pakainya. Pemanfaatan kendaraan listrik yang meluas akan meningkatkan permintaan litium, kobalt, dan nikel, yang berimplikasi pada kegiatan pertambangan. Produksi baterai elektronik akibat proses ekstraksi mineral tersebut, dalam pengalaman Indonesia, mengekstraksi sejumlah besar air bersih, mencemari danau dan sumber air minum, memengaruhi perikanan sungai, merusak terumbu karang, dan menyebabkan penggundulan hutan serta seringnya banjir. Selain itu, penambangan nikel dan mineral lainnya di Indonesia juga memicu konflik, kekerasan, dan kriminalisasi di beberapa daerah. Produksi nikel membutuhkan banyak energi dan masih berasal dari peleburan batu bara dengan jejak karbon yang tinggi. Meskipun material ini dikatakan dapat didaur ulang, proses daur ulang saat ini membutuhkan banyak uang dan energi, dan dampak jangka panjang dari daur ulang baterai bekas masih belum diketahui. Proposal tersebut memerlukan informasi lebih lanjut tentang mekanisme pengolahan limbah baterai di masing- masing negara untuk meminimalkan pencemaran lingkungan. Tidak ada kebutuhan khusus negara dan penilaian prioritas yang menjadi dasar bagi negara untuk diikutsertakan dalam Program. Intervensi khusus negara yang diusulkan lebih didorong oleh pasokan daripada mencerminkan kebutuhan dan prioritas inti negara. Ada juga kekhawatiran tentang bagaimana model pengiriman, yang belum diputuskan, dari pengadaan dan pemasangan infrastruktur pendukung akan memengaruhi aksesibilitas dan keterjangkauan bus listrik di masing- masing negara tempat bus listrik akan diimplementasikan, terutama dalam kasus di mana model pengiriman kemitraan publik-swasta dicari. Proposal pendanaan tidak merujuk pada kekhawatiran tentang keterjangkauan bagi pengguna bus. ADB menyediakan pinjaman kepada negara-negara yang sudah terlilit utang besar untuk bus listrik dan infrastruktur terkait, dan tidak ada jaminan bahwa transisi ke bus listrik tidak akan menyebabkan kenaikan harga tiket bagi pengguna perorangan. ADB tidak memasukkan koperasi transportasi dan serikat pengemudi dalam daftar pihak-pihak yang diajak konsultasi untuk FP ini. Melibatkan koperasi dan serikat pekerja transportasi, yang akan melaksanakan proyek dan merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dari FP ini, merupakan bagian penting untuk menghilangkan sebagian besar risiko teknis dan finansial yang disebutkan dalam proyek. https://www.gcfwatch.org/wp-content/uploads/2024/03/GCFWatch_B.38-Intervention_05Mar24_FP225.pdf
--	--

Rencana Aksi Gender (RAG)	Rencana Aksi Gender mencakup kegiatan-kegiatan khusus di tingkat Program dan proyek: • Penilaian tingkat negara yang bersifat sektoral sebagai bagian dari pengembangan peta jalan kendaraan listrik rendah karbon. • Mendukung pertukaran pengetahuan dan kolaborasi mengenai aspek gender dalam transportasi. • Mengintegrasikan komponen gender dalam proyek-proyek yang didanai oleh Program. https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b38-02-add05-funding-proposal-package-fp225.pdf Status of GAP implementation Tidak ada informasi tentang status implementasi Pandangan CSO terhadap RAG GAP tidak memadai dan ketinggalan zaman meskipun ADB menegaskan dalam sesi teknis bahwa rencana aksi gender tingkat subproyek akan melengkapinya. Rencana tingkat program itu sendiri sudah ketinggalan zaman, merujuk pada elemen modal yang diusulkan yang tidak lagi menjadi bagian dari proposal pendanaan. Tidak adanya konsultasi kelompok perempuan dalam konsultasi pemangku kepentingan dalam merancang Program e-mobilitas sangat memprihatinkan. https://www.gcfwatch.org/wp-content/uploads/2024/03/GCFWatch_B.38-Intervention_05Mar24_FP225.pdf
Status implementasi	Tidak ada informasi lebih lanjut setelah proposal pendanaan disetujui.
Tantangan dalam pemantauan	Per 14 April 2024 tidak ada dokumen yang tercantum di situs web GCF pada halaman FP 225 maupun di situs web NDA Indonesia. Dokumen terkait FP 225 untuk B38 dapat ditemukan di halaman Ruang Rapat untuk B38 yang terdiri dari halaman utama (proposal pendanaan), dan lainnya sebagai lampiran termasuk GAP, di: https://www.greenclimate.fund/boardroom/meeting/b38. Selain itu, tidak ada dokumen yang tercantum di situs web NDA Indonesia, hanya deskripsi singkat proyek. ADB menyatakan bahwa proposal pendanaan, termasuk lampirannya, tidak boleh diungkapkan secara lengkap oleh GCF dan karenanya memberikan Sekretariat GCF dua salinan proposal pendanaan, termasuk semua lampiran, salinan lengkap untuk penggunaan internal GCF di mana bagian rahasia ditandai sebagaimana mestinya dan catatan penjelasan mengenai bagian tersebut dan alasan kerahasiaan yang sesuai berdasarkan kebijakan pengungkapan entitas terakreditasi, dan salinan yang disunting untuk diungkapkan di situs web GCF. https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b38-02-add05-funding-proposal-package-fp225.pdf

Glossary

Akreditasi: Akreditasi merupakan prasyarat bagi semua entitas untuk mengakses dana GCF. Akreditasi merupakan proses yang mengharuskan setiap entitas/lembaga untuk menunjukkan kemampuannya mengelola sumber daya GCF sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan oleh Dana tersebut. Kelayakan entitas untuk mendapatkan akreditasi didasarkan pada tiga kriteria, yaitu standar fidusia, perlindungan lingkungan dan sosial, serta kebijakan gender.

Entitas Terakreditasi: GCF menyalurkan pendanaannya untuk aksi iklim di negara-negara berkembang melalui entitas terakreditasi (AE). AE GCF dapat berupa entitas internasional, regional, nasional, dan subnasional, termasuk bank publik dan komersial; lembaga pembangunan internasional dan bilateral; kementerian atau lembaga pemerintah lainnya; pelaku sektor swasta; dan organisasi nonpemerintah lainnya. Agar dapat diakreditasi oleh GCF, entitas pemohon harus mengajukan akreditasi dan memenuhi persyaratan akreditasi yang ditetapkan oleh GCF, seperti perlindungan lingkungan, sosial, dan gender, serta prinsip dan standar manajemen keuangan dan proyek. Mereka diakreditasi selama lima tahun dan kemudian perlu mengajukan permohonan kembali.

Pengamat Aktif: Pengamat yang memiliki kemungkinan untuk berpartisipasi dalam rapat Dewan GCF dengan hak untuk berbicara. Ada empat slot untuk peran ini, yang diisi oleh dua perwakilan organisasi masyarakat sipil terakreditasi (satu dari negara maju dan satu dari negara berkembang); dan dua perwakilan organisasi sektor swasta terakreditasi (satu dari negara maju dan satu dari negara berkembang).

Adaptasi mengacu pada penyesuaian sistem ekologi, sosial, dan ekonomi sedemikian rupa untuk membangun ketahanan masyarakat manusia dan ekosistem alam sehingga dapat memoderasi atau meminimalkan potensi kerusakan atau untuk mendapatkan manfaat dari peluang yang terkait dengan perubahan iklim.

Laporan Kinerja Tahunan: Laporan tentang kemajuan dan hasil proyek dan program. Laporan ini memberikan pembaruan tentang implementasi setiap kegiatan dengan membandingkan indikator dengan tujuan. Laporan ini juga mengidentifikasi tantangan atau masalah yang dihadapi selama implementasi dan tindakan yang diambil untuk mengatasinya.

Pendanaan iklim adalah aliran dana dari negara maju ke negara berkembang untuk mengatasi masalah yang terkait dengan perubahan iklim. Ini merujuk pada pendanaan lokal, nasional, atau transnasional, yang utamanya disediakan oleh negara-negara maju, yang dapat diambil dari sumber-sumber publik, swasta, dan alternatif serta dimobilisasi untuk membantu negara-negara berkembang mengurangi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Negara-negara berkembang bertujuan untuk memanfaatkan dana yang tersedia guna memastikan proses pembangunan nasional rendah karbon dan membangun ketahanan dari perubahan iklim. Akhir-akhir ini, pendanaan iklim juga mengalir dari negara-negara berkembang yang lebih kaya ke negara-negara berkembang yang lebih miskin dalam bentuk kerja sama Selatan-Selatan.

Pendanaan bersama: Sumber daya keuangan, baik keuangan publik maupun keuangan swasta, yang dibutuhkan sebagai tambahan dari hasil GCF untuk melaksanakan kegiatan yang didanai yang proposal pendanaannya telah diajukan.

Pinjaman konsesional adalah salah satu instrumen keuangan yang memiliki fitur khusus dengan bunga tanpa bunga atau lebih rendah dan jadwal pembayaran yang diperpanjang daripada pinjaman pasar standar atau pinjaman multilateral yang diberikan oleh GCF kepada negara-negara miskin dan rentan terhadap iklim untuk melaksanakan tindakan iklim dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Terdapat dua kelompok pinjaman lunak: (a) Pinjaman Lunak 1 (sangat lunak): Suku bunga nol persen dengan jangka waktu 15 hingga 40 tahun termasuk masa tenggang 5 hingga 10 tahun; (b) Pinjaman Lunak 2 (cukup lunak): Suku bunga didasarkan pada suku bunga acuan pinjaman (Euro: suku bunga Bank Sentral Eropa, Dolar AS: suku bunga acuan Bank Sentral Amerika, dan Dolar Kanada: suku bunga acuan Bank Sentral Kanada).

Program negara: Dokumen yang dikembangkan oleh NDA/titik fokus yang menyajikan prioritas perubahan iklim suatu negara kepada GCF, termasuk alur proyek yang ingin dikembangkan negara tersebut dengan GCF untuk setiap periode pengisian ulang. Dokumen ini menyediakan rencana aksi untuk proyek dan program yang akan dikembangkan, entitas terakreditasi atau calon entitas yang akan menjadi mitra, dan dukungan kesiapan dan persiapan proyek yang memerlukan pendanaan dari GCF. Program negara merupakan langkah 1.1 dari proses persetujuan proposal.

Kepemilikan Negara/Berorientasi pada Negara: Prinsip kepemilikan negara berasal dari wacana efektivitas bantuan dan merupakan salah satu prinsip inti yang disetujui dalam Instrumen Pengatur GCF. Prinsip kepemilikan negara melampaui fokus sempit hanya pada interaksi pemerintah-pendana dan juga menyiratkan partisipasi yang berarti dan akuntabilitas kepada berbagai pemangku kepentingan domestik. Dalam konteks keuangan iklim dan GCF, kepemilikan negara menyiratkan hal berikut: keuangan iklim selaras dengan strategi dan prioritas nasional; tanggung jawab pengambilan keputusan dilimpahkan kepada lembaga-lembaga di dalam negara; sistem nasional digunakan untuk memastikan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan iklim; dan proses multi-pemangku kepentingan yang komprehensif dan inklusif digunakan untuk mengembangkan strategi negara, mengawasi implementasinya, dan mengevaluasi hasilnya, dengan demikian berkontribusi pada akuntabilitas domestik.

Akses Langsung: Mekanisme di mana entitas nasional terakreditasi dari negara-negara berkembang memperoleh akses langsung ke dana GCF untuk melaksanakan proyek dan/atau program yang dipilih. Entitas-entitas ini mungkin ingin memilih entitas pelaksana lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Entitas akses langsung (DAE): DAE adalah entitas yang terakreditasi berdasarkan modalitas akses langsung, termasuk entitas subnasional, nasional atau regional, yang telah memperoleh nominasi dari NDA/titik fokus. Mereka dapat mencakup kementerian atau lembaga pemerintah, bank pembangunan, dana iklim, bank komersial atau lembaga keuangan lainnya, yayasan swasta dan organisasi non-pemerintah.

Akses Langsung yang Ditingkatkan (EDA) adalah mekanisme di mana negara-negara berkembang mengakses keuangan melalui entitas nasional terakreditasi dari GCF untuk melaksanakan program dengan pengambilan keputusan yang dilimpahkan untuk pemilihan dan persetujuan proyek di tingkat negara. Negara dan entitas memiliki kepemilikan dan kekuatan pengambilan keputusan yang lebih besar untuk melaksanakan program yang disetujui oleh GCF. Berdasarkan modalitas EDA, GCF telah berkomitmen untuk menyediakan USD 200 juta untuk setidaknya 10 proyek percontohan - empat di antaranya akan dilaksanakan di Negara-negara Kepulauan Kecil yang Berkembang, Negara-negara Kurang Berkembang, dan Negara-negara Afrika.

Ekuitas: Ekuitas adalah selisih antara nilai aset dan nilai liabilitas dari sesuatu yang dimiliki. Sebagai alternatif, ekuitas juga dapat merujuk pada modal saham perusahaan. Dalam hal ini, nilai modal saham bergantung pada prospek ekonomi masa depan perusahaan.

Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial (ESS): Kebijakan GCF, yang diadopsi oleh Dewan dalam keputusan B.19/10, yang menetapkan persyaratan ESS yang berlaku dalam persiapan dan pelaksanaan semua proyek yang didanai GCF. Kebijakan tersebut mengartikulasikan komitmen GCF terhadap pembangunan berkelanjutan, menguraikan bagaimana GCF mengintegrasikan isu-isu lingkungan dan sosial ke dalam proses dan kegiatannya, dan menetapkan peran dan tanggung jawab AE, entitas pelaksana, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan proyek sehubungan dengan ESS.

Entitas Pelaksana: Sementara sebagian besar dana iklim mengharuskan negara yang mencari dukungan pendanaan untuk melalui organisasi internasional terakreditasi (seperti MDB atau badan PBB), GCF memungkinkan akses internasional dan langsung. Di bawah akses langsung, negara yang ingin menerima pendanaan GCF dapat bekerja dengan entitas pelaksana regional, nasional, atau sub-nasional yang telah diakreditasi dengan GCF, seperti kementerian pemerintah, organisasi regional, atau pelaku sektor swasta domestik atau organisasi masyarakat sipil. Hal ini memperkuat kepemilikan negara berkembang atas pendanaan GCF yang mereka terima, karena negara perlu mendukung entitas akses langsung sebelum mereka dapat mencari akreditasi dengan GCF.

Proposal Pendanaan: Serangkaian dokumen yang disiapkan oleh AE dan diserahkan ke GCF untuk memformalkan aplikasi pendanaan untuk proyek atau program.

GCF Watch: Platform informasi tentang GCF yang dipimpin oleh organisasi masyarakat sipil dari Global South. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemantauan operasi GCF melalui kolaborasi antara organisasi dan masyarakat yang berkepentingan.

Kebijakan Gender: Kebijakan Gender GCF yang Diperbarui, yang diadopsi oleh Dewan dalam keputusan B.24/12, bertujuan untuk memastikan bahwa GCF akan berkontribusi pada kesetaraan gender melalui pendekatan yang peka gender dan pada gilirannya akan mencapai hasil perubahan iklim yang lebih besar dan lebih berkelanjutan. Setiap AE diharuskan memiliki kebijakan gender yang setara dengan Kebijakan Gender GCF dan menerapkan kebijakan gendernya sendiri dalam kegiatan yang didanai GCF.

Instrumen Pengatur: Instrumen Pengatur menyediakan berbagai parameter, standar, dan prinsip untuk memandu operasi GCF, khususnya proses pengambilan keputusan Dewan GCF.

Hibah adalah jenis instrumen keuangan yang disediakan oleh GCF untuk menangani proyek/program adaptasi dan/atau mitigasi iklim di negara-negara berkembang tanpa harapan pembayaran kembali. Baik entitas internasional maupun nasional yang diakreditasi oleh GCF memenuhi syarat untuk mendapatkan hibah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati.

Jaminan: Jaminan/perlindungan kerugian pertama. Penjamin berjanji untuk memenuhi kewajiban peminjam kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak memenuhi atau gagal memenuhi kewajibannya, dengan imbalan biaya. Jaminan dapat mencakup seluruh investasi atau hanya sebagian saja. Instrumen mitigasi risiko seperti jaminan berfokus pada pengurangan risiko gagal bayar utama (teknologi, politik, dll.) di berbagai titik dalam siklus pembiayaan. Asuransi melibatkan pengalihan risiko kerugian dari satu entitas ke entitas lain dengan imbalan uang.

Salah satu jenis jaminan adalah perlindungan kerugian pertama. Instrumen perlindungan kerugian pertama melindungi investor dari sejumlah kerugian finansial yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga meningkatkan kelayakan kredit dan memperbaiki profil keuangan investasi. Instrumen tersebut secara langsung mengurangi risiko pembiayaan proyek dengan mengalihkan sebagian potensi kerugian kepada sponsor yang menawarkan perlindungan yang dapat berupa kontribusi yang didanai untuk investasi (seperti suntikan dana) atau jaminan atau jalur kredit yang tidak didanai untuk diambil saat dibutuhkan. Dengan membuat proyek lebih menarik bagi investor arus utama (atau dengan menggabungkannya di bawah mekanisme yang sama), instrumen tersebut juga mengurangi persepsi risiko likuiditas.

Entitas Pelaksana: Entitas pelaksana (IE) adalah entitas internasional, regional, nasional, atau subnasional yang dapat berupa entitas publik, swasta, atau nonpemerintah dan terakreditasi oleh GCF. Pendanaan untuk proyek dan program GCF di negara penerima selalu mengalir melalui IE. IE secara langsung melaksanakan proyek dan program GCF atau mengawasi pelaksanaan proyek dan program GCF melalui entitas pelaksana yang mereka pilih. IE memiliki kontrak (perjanjian hukum) dengan GCF dan harus secara berkala melaporkan kepada GCF tentang pelaksanaan dan hasil proyek. Di antara entitas terakreditasinya, GCF membedakan antara entitas pelaksana, yang hanya mengelola proyek dan IE khusus yang disebut perantara. Berbeda dengan IE, perantara juga memiliki kemampuan untuk meneruskan pendanaan GCF ke organisasi lain dalam bentuk hibah, pinjaman, investasi ekuitas, dan jaminan risiko. Kebijakan Masyarakat Adat: kebijakan GCF yang diadopsi oleh Dewan dalam keputusan B.19/11, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan GCF dikembangkan dan dilaksanakan dengan cara yang menumbuhkan rasa hormat, promosi, dan perlindungan penuh terhadap masyarakat Adat sehingga mereka memperoleh manfaat dari kegiatan dan proyek GCF dengan cara yang sesuai dengan budaya; dan tidak mengalami kerugian atau dampak buruk dari desain dan pelaksanaan kegiatan yang didanai GCF. Semua proyek GCF harus mematuhi persyaratan Kebijakan Masyarakat Adat yang berlaku.

Perantara: Dalam mengakreditasi entitas yang menerima pendanaannya, GCF membedakan antara entitas pelaksana, yang hanya mengelola proyek dan IE khusus yang disebut perantara. Perantara paling sering adalah bank internasional, regional, atau domestik publik atau komersial atau lembaga pembangunan bilateral. Selain manajemen proyek, mereka juga memiliki kemampuan untuk meneruskan pendanaan GCF ke organisasi lain dalam bentuk hibah, pinjaman, investasi ekuitas, dan jaminan risiko. Untuk menunjukkan kapasitas ini, entitas yang ingin mendapatkan akreditasi GCF sebagai perantara harus memenuhi serangkaian persyaratan fidusia khusus.

Kerugian dan kerusakan (loss and damage) mengacu pada dampak negatif perubahan iklim yang belum dapat diatasi atau diadaptasi oleh masyarakat. Kerugian dan kerusakan yang berasal dari dampak perubahan iklim dapat bersifat ekonomi dan non-ekonomi. Konsep ini diperkenalkan dalam UNFCCC pada Sesi ke-13 COP di Bali, Indonesia dan kemudian, dalam Kerangka Adaptasi Cancun pada tahun 2010.

Mitigasi: Mitigasi adalah intervensi manusia yang bertujuan untuk mengurangi sumber atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca. Ini dapat mencakup kegiatan seperti menggunakan bahan bakar fosil secara lebih efisien untuk keperluan industri, transportasi atau pembangkitan listrik, beralih ke energi surya atau tenaga angin, meningkatkan isolasi bangunan, dan memperluas hutan dan 'penyerap' lainnya untuk menghilangkan lebih banyak karbon dioksida dari atmosfer.

Otoritas Nasional yang Ditunjuk dan/atau Titik Fokus: Negara-negara berkembang harus menunjuk, sesuai dengan preferensi mereka, Otoritas Nasional yang Ditunjuk (NDA) atau Titik Fokus (FP) sebagai titik kontak antara negara tersebut dan GCF. NDA dan FP memainkan peran mendasar melalui "prosedur tanpa keberatan", yang memastikan semua proposal proyek dan program yang diajukan oleh entitas terakreditasi, sejalan dengan prioritas dan kebutuhan negara tersebut.

Surat tidak keberatan (NOL): surat yang ditandatangani dan diterbitkan oleh NDA GCF atau perwakilan resmi focal point sesuai dengan prosedur tanpa keberatan GCF, yang diadopsi dalam Keputusan B.08/10, Lampiran XII. Komunikasi "tanpa keberatan" menyiratkan bahwa pemerintah negara tersebut tidak berkeberatan dengan proposal pendanaan. Tanpa keberatan adalah syarat untuk memasukkan negara yang relevan dalam persetujuan semua proposal pendanaan yang diajukan ke GCF. Formulir templat untuk NOL tersedia di situs web GCF.

Prosedur tidak keberatan: Tujuan dari prosedur tanpa keberatan adalah untuk memastikan konsistensi dengan strategi dan rencana iklim nasional dan pendekatan yang didorong oleh negara. Tanpa keberatan diberikan kepada GCF oleh NDA atau focal point, bersamaan dengan setiap pengajuan proposal pendanaan oleh entitas terakreditasi dari Dana tersebut. Jika proposal diajukan tanpa surat pernyataan tidak keberatan, GCF akan memberi tahu NDA atau focal point dan hanya akan mengajukan proposal kepada Dewan jika pernyataan tidak keberatan diterima dalam waktu 30 hari sejak pemberitahuan. Setiap negara akan memutuskan proses nasional yang sesuai untuk memastikan tidak adanya keberatan terhadap proposal pendanaan sesuai dengan kapasitas negara dan proses serta lembaga yang ada.

Perjanjian Paris adalah perjanjian internasional yang disepakati pada Sidang ke-21

Konferensi Para Pihak (COP21) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim yang diadakan pada bulan November 2015 di Paris, Prancis. Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat respons global terhadap ancaman perubahan iklim dengan menjaga kenaikan suhu global pada abad ini jauh di bawah 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri dan untuk melakukan upaya guna membatasi kenaikan suhu lebih jauh lagi hingga 1,5 derajat Celsius. Perjanjian Paris mulai berlaku pada tanggal 4 November 2016.

Program Dukungan Kesiapan dan Persiapan (RPSP): RPSP atau Program Kesiapan diamanatkan oleh Instrumen Pengatur GCF. RPSP bertujuan untuk mendukung negara-negara dalam memperkuat lingkungan pendukung dan sistem keuangan yang lebih luas serta memajukan penerjemahan strategi iklim nasional menjadi aliran investasi iklim yang dapat dibiayai bank. Pada pertemuan ke-33, Dewan menegaskan kembali bahwa Program Kesiapan merupakan prioritas strategis bagi GCF untuk meningkatkan kepemilikan negara, mendorong akses langsung ke sumber daya GCF, dan memperkuat program strategis.

REDD +: Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) dan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan di negara-negara berkembang (REDD-plus) merupakan salah satu wahana mekanisme multilateral di bawah UNFCCC yang pada dasarnya didedikasikan untuk menyediakan ketentuan keuangan bagi negara-negara berkembang dalam upaya mereka untuk mengurangi emisi dan menghilangkan gas rumah kaca melalui berbagai strategi pengelolaan hutan.

Hibah yang dapat diganti: Hibah yang dapat diganti dibayarkan hanya setelah organisasi menghabiskan uang untuk inisiatif di muka (yaitu, pemberi dana mengganti biaya yang telah dikeluarkan)

Pinjaman subordinasi Accreditation: Accreditation is a pre-requisite for all entities to access GCF funds. It is a process that requires each entity/institution to demonstrate its ability to manage the GCF's resources in accordance with the standards and criteria set by the Fund. An entity's eligibility for accreditation is based on three criteria i.e. fiduciary standards, environmental and social safeguards and gender policy.

—000—



Publikasi ini diproduksi dengan pendanaan bersama dari Uni Eropa dan GAGGA.
Isinya sepenuhnya merupakan tanggung jawab Aksi! dan tidak mencerminkan
pandangan Uni Eropa dan GAGGA